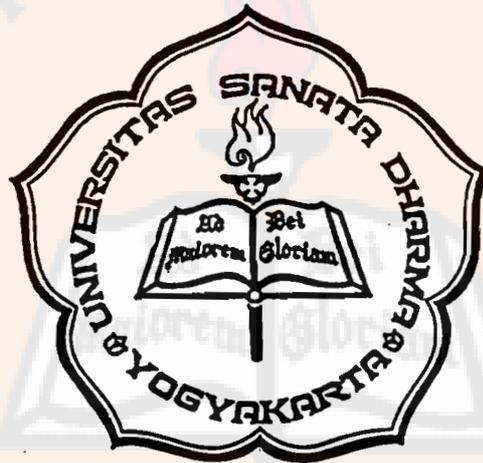


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**STUDI DISKRIPSTIF SOSIAL KEAGAMAAN
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PURWOREJO
PERIODE 1952 - 1984**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

A M I R

N I M : 89214029

NIRM : 890052010604120027

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1994

SKRIPSI

STUDI DISKRIPITIF SOSIAL KEAGAMAAN
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PURWOREJO
PERIODE 1952 - 1984

Oleh :

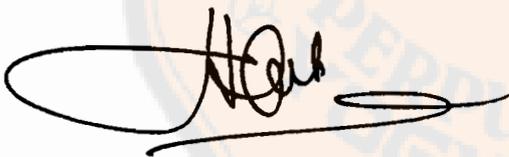
A M I R

N I M : 89214029

NIRM : 890052010604120027

Telah Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

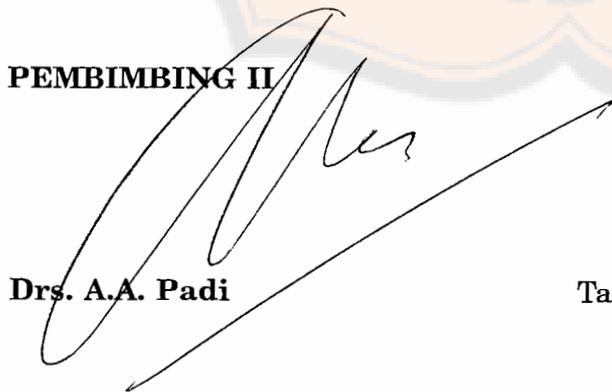


Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal,

17 Juni 1994.

PEMBIMBING II



Drs. A.A. Padi

Tanggal,

17 Juni 1994.

SKRIPSI
STUDI DISKRIPITIF SOSIAL KEAGAMAAN
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PURWOREJO
PERIODE 1952 - 1984

yang dipersiapkan dan disusun oleh

A M I R

N I M : 89214029

NIRM : 890052010604120027

telah dipertahankan di depan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 25 Juni 1994
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Tanda Tangan

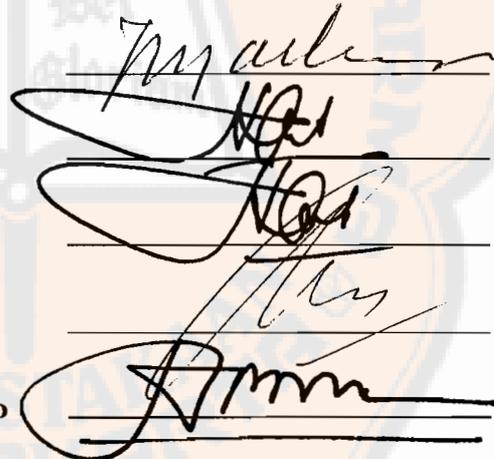
Ketua : Drs. J. Markiswo

Sekretaris : Drs. A.K. Wiharyanto

Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto

: Drs. A.A. Padi

: Drs. J.B.M. Mujihardjo



Yogyakarta, 22 Agustus 1994

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Dr. A. Priyono Marwan, SJ

Priyono Marwan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bertema " Perkembangan Sosial Keagamaan Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo Periode 1952-1984".

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan penyelesaian studi program sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mengalami banyak kekurangan. Hal tersebut semata-mata karena kekurangmampuan penulis dalam bidang penelitian dan kurangnya pengetahuan dalam masalah Nahdlatul Ulama. Adapun kelancaran penulis dalam skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs.A.K.Wiharyanta yang telah sudi mendampingi dan membimbing proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs A.A.Padi yang juga dengan senang hati mendampingi dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak R.Subarkah Hasyim ketua Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo yang telah berkenan memberikan kesempatan dan fasilitas lain yang sangat bermanfaat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagi penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Al Hatak sekretaris Nahdlatul Ulama cabang Purworejo yang banyak memberikan bantuan terutama dalam rangkian mencari nara sumber.
5. Bapak Kyai Jumali Mantan Ketua Lembaga Maarif yang telah memberikan banyak keterangan yang berkaitan dengan perkembangan Nahdlatul Ulama pada periode yang lalu.
6. Bapak Muhtarom BA Nara Sumber dalam bidang da'wah yang banyak memberikan keterangan mengenai lembaga da'wah dalam periode yang lalu.
7. Bapak Drs Khanifan dan Bapak Drs Mujahid yang juga banyak memberikan keterangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan di sini satu persatu, namun turut mendukung dan memberikan bantuan sehingga skripsi ini bisa selesai

Semoga budi baik dari keseluruhan pihak di atas mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta,

Penulis

A m i r

Daftar Isi



Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Penjelasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Penelitian	15
3. Tehnik Pengumpulan Data	15
a. Wawancara	16
b. Studi Dokumen	17
c. Studi Kepustakaan	17
4. Tehnik Analisa Data	18
5. Sistematika Penulisan	19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II : DISKRIPSI SINGKAT WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO

A. Letak Geografi dan Keadaan Alam	20
B. Penduduk	22
C. Pendidikan	24
D. Agama	26

BAB III : KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN NU KABUPATEN PURWOREJO

A. BIDANG DA'WAH

1. Pengertian Da'wah dan Kepastian Hukum	28
2. Aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984 ..	30
a. Pelaku Da'wah	31
b. Sasaran Da'wah	34
c. Media Da'wah	37
d. Metode Da'wah	37
e. Lokasi Da'wah	40
f. Materi Da'wah	43
3. Perbandingan Perkembangan Aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984	45

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Hakekat Pendidikan Versi Nahdlatul Ulama	50
2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Purworejo tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984...	54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Tahun 1952-1973	54
1. Pendidikan Dasar	55
a). Madrasah Ibtidaiyah	55
b). Madrasah Dinniyah	57
c). Madrasah Wajib Belajar	58
2. Pendidikan Tingkat Lanjutan Pertama	59
a). Pendidikan Guru Agama	60
b). Madrasah Tsanawiyah	61
c). Sekolah Menengah Pertama	61
3. Pendidikan Lanjuatan Tingkat Atas	62
4. Pendidikan Tinggi	62
b. Tahun 1973-1984	68
3. Perbandingan Perkembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif antara tahun 1952-1973 dan tahun 1973- 1984	73

C. BIDANG SOSIAL

1. Masalah Sosial Umat Islam dan Keawajiban Organisasi Nahdlatul Ulama	73
2. Kegiatan Sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984	76
3. Perbandingan Perkembangan Aktivitas Sosial Nahdla tul Ulama Cabang Purworejo tahun 1952-1973 dan ta- hun 1973-1984	86

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IVII : KESIMPULAN90

Daftar Pustaka92

Sumber Lisan101



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Skripsi yang bertema "Perkembangan Sosial Keagamaan Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo Periode 1952-1984", ditulis untuk membicarakan mengenai bagaimana Nahdlatul Ulama yang sebenarnya organisasi sosial keagamaan menjalankan aktivitasnya disamping melaksanakan kegiatan politik praktisnya. Berbagai kegiatan seperti da'wah, pendidikan, sosial dan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai Islam sehingga diharapkan akan terwujud masyarakat Islam yang adil dan makmur. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini, organisasi ini menyerahkan tanggung jawabnya kepada masing-masing lembaga otonominya, sehingga muncul Lembaga Da'wah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial dan Lembaga Ekonomi. Walaupun pelaksanaannya diserahkan masing-masing lembaga, tetapi pada kenyataannya semua bidang tersebut saling berhubungan dan mendukung demi tercapainya tujuan Nahdlatul Ulama.

Kegiatan da'wah dibicarakan pada urutan pertama dengan alasan bahwa da'wah merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan organisasi ini. Hal tersebut bisa dilihat dari latar belakang pendirian organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan reaksi dari kedatangan Belanda dan munculnya organisasi Muhammadiyah. Sedangkan bidang Pendidikan, bidang Sosial dan bidang ekonomi dibicarakan secara berturut-turut setelah bidang da'wah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam skripsi ini penulis mencantumkan / memilih batasan waktu 1952-1984, dengan alasan bahwa pada periode tersebut Nahdlatul Ulama secara aktif berkecimpung dalam politik praktis, sehingga bidang sosial keagamaan yang seharusnya lebih diutamakan menjadi tidak begitu diperhatikan. Tahun 1952 Nahdlatul Ulama secara resmi berdiri sebagai partai politik dan pada tahun 1984 secara resmi pula Nahdlatul Ulama menyatakan diri dari kegiatan berpolitik.

Keadaan dan perkembangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo selama periode 1952-1984 tersebut, penulis bedakan menjadi 2 kurun waktu yaitu tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984. Selama kurun waktu 1952-1973 Nahdlatul Ulama menjadi partai politik yang berdiri sendiri, sedangkan kurun waktu 1973-1984 Nahdlatul Ulama telah berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Oleh karena kedudukan yang berbeda inilah, maka sudah barang tentu perkembangan sosial keagamaannya juga berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut penulis juga membuat perbandingan perkembangan dalam 2 periode tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi diskriptif sosial keagamaan "Nahdlatul Ulama" 1) kabupaten Purworejo periode 1952-1984, , merupakan tema yang sengaja dipilih penulis dalam skripsi ini dengan berlandaskan pada beberapa alasan. Pertama, setelah penulis mencoba mengadakan studi kepustakaan, tidak dijumpai tulisan ilmiah seperti tema di atas. Kedua, dalam kurun waktu 1952-1984 banyak peristiwa-peristiwa unik yang dialami oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini. Memang banyak tulisan ilmiah yang mengupas Nahdlatul Ulama baik tingkat nasional maupun tingkat lokal, namun masalahnya sangat berlainan dengan tulisan yang akan penulis kerjakan.

Choirul Anam menulis skripsi yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul "PERTUMBUHAN DAN PERKEM-

1) Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab 'Nahdlah' yang berarti ; bangkit atau bergerak, dan ulama berasal dari kata tunggal 'Alim' yang dijamakkan dan kata ini berarti yang mengetahui atau yang berilmu. Kata 'Nahdlah' kemudian barsandar pada kata 'Nlama menjadi "Nahdlatul Ulama", yang berarti kebangkitan ulama atau pergerakan ulama. Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, (Sala : Jatayu , 1985), hlm.7.

BANGAN NAHDLATUL ULAMA", dan menurut HM.Hasyim Latief (ketua Nahdlatul Ulama Jawa Timur) merupakan buku terlengkap diantara buku yang telah beredar mengenai Nahdlatul Ulama. Secara garis besar buku Choirul Anam ini menguraikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, sistem nilai yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama dan pergeseran nilai serta perubahan bentuk dari organisasi tersebut, dari organisasi sosial keagamaan ke organisasi politik serta akhirnya kembali dalam bentuk asal yakni organisasi sosial keagamaan.²⁾ Sedangkan karya ilmiah lain tentang Nahdlatul Ulama adalah karya Pendeta Einar Sitompul, M.Th dengan judul "NAHDLATUL ULAMA DAN PANCASILA", karya inipun semula berasal dari tesis beliau yang diajukan pada South East Asia Graduate School of Theology (Sebuah konsorsium Sekolah Tinggi Theologia Se-Asia Tenggara).³⁾ Pada dasarnya tulisan beliau tidak jauh berbeda dengan tulisan Choirul Anam, hanya saja Pendeta Einar Sitompul ini pada bab-bab terakhir mengupas mengenai penerimaan Nahdlatul Ulama atas Pancasila. Tulisan di atas memiliki ruang dan waktu yang cukup luas yakni mencakup wilayah Indonesia, sementara waktunya cukup panjang yaitu sejak tahun 1926-1984.

Padahal pada kurun waktu 1952-1984 terdapat peristiwa

2) Ibid ., hlm.IX - X.

3) Martahan Einar Sitompul, NU dan Pancasila, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm.5.

penting yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sejak tahun 1952 Nahdlatul Ulama secara resmi menjadi partai politik yang dikukuhkan melalui muktamarnya ke-19⁴⁾ Menurut Syamsuddin Haris, keputusan untuk menjadi partai politik sekurang-kurangnya membawa tiga implikasi. Pertama, orientasi Nahdlatul Ulama sebagai suatu jamiah semakin kabur. Kedua, sebagai akibat pertama, Nahdlatul Ulama menjadi berorientasi politik. Ketiga, sebagai akibat kedua, Nahdlatul Ulama relatif lebih membutuhkan "menejer politik" daripada para kyai yang lebih akrab dengan kitab klasik atau kuning. Memang pada tiga tahun pertama pendiriannya sebagai partai politik, Nahdlatul Ulama telah membuktikan kemampuannya berpolitik yang ditunjukkan dengan perolehan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Dalam Pemilihan Umum ini, Nahdlatul Ulama berhasil menempatkan dirinya dalam urutan "tiga besar" (Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama). Bahkan setelah Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960, Nahdlatul Ulama menjadi partai politik Islam terbesar dan memperoleh suara terbanyak kedua setelah Golongan Karya pada Pemilu 1971. Demikian juga ketika fusi harus diterima sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa ditolak pada tahun 1973, Nahdlatul Ulama bukan saja mendominasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

4) Syamsuddin Haris, " NU dan Politik : Perjalanan Mencari Identitas", dalam Jurnal Politik 7 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm.34.

melainkan juga mengetuai tiga dari empat kewenangan yang ada dalam Dewan Pimpinan Partai (DPP) PPP, yaitu Presiden Partai (KH Idham Chalid), Ketua Umum Majelis Pertimbangan Pusat (KH Masykur), dan Rois 'Aam (ketua umum) Majelis Syuro dipegang oleh Kyai Bisri Syamsuri.⁵⁾

Oleh karena kiprahnya dalam bidang politik telah berjalan cukup lama terutama sejak tahun 1952, maka kemudian Nahdlatul Ulama lebih terkenal sebagai organisasi politik bukan sebagai organisasi sosial keagamaan. Kegiatan Nahdlatul Ulama dalam bidang politik praktis secara berlebihan sejak tahun 1952 tersebut, telah menjadikan Nahdlatul Ulama kurang peka menanggapi perkembangan jaman, sehingga Nahdlatul Ulama tidak lagi berjalan sesuai dengan hakekatnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Selama menjadi partai politik, ia lebih terpaku pada prestise dan prestasi politik praktis dibanding menanggapi perkembangan sekitarnya secara keagamaan.

Dengan keputusan kembali ke khittah 1926, melalui muktamarnya ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984 berarti Nahdlatul Ulama telah bertekad untuk kembali ke bentuk organisasi asal yaitu organisasi sosial keagamaan. Nahdlatul Ulama yang sejak tahun 1952 telah akrab dengan kegiatan politik praktis dan menjadikan organisasi ini menjadi terkenal sebagai organisasi politik

5) Ibid., hlm.30.

kabupaten ini memiliki banyak pesantren yang oleh banyak tokoh seperti Choirul Anam, Kacung Marijan, Syafi'i Ma'arif sebagai pendukung organisasi Nahdlatul Ulama. Memang antara pesantren dengan Nahdlatul Ulama memiliki hubungan yang sangat erat sebab Nahdlatul Ulama lahir dan dibesarkan oleh pesantren.

B. Perumusan Masalah

Muhammad Hatta mendefinisikan masalah sebagai berikut : masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang suatu kedudukan, tetapi kita tidak puas hanya melihat saja melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam.⁶⁾ Sedangkan Winarno Surachmad mengemukakan masalah sebagai suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk mengatasinya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang harus dihadapi.⁷⁾

Dengan demikian rumusan masalah adalah merumuskan gejala atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan dan menarik perhatian kita untuk memecahkannya atau mencari jawabnya.

6) Muhammad Hatta, Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan, Jakarta : PT Pembangunan, 1959, hlm.10.

7) Winarno Surachmad, Dasar dan Tehnik Research : Suatu Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1970), hlm.33.

Berdasarkan pengertian ini, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan kegiatan da'wah Nahdlatul Ulama cabang Purworejo pada periode 1952-1984 ?
2. Bagaimana perkembangan kegiatan pendidikan Nahdlatul Ulama cabang Purworejo pada periode 1952-1984 ?
3. Bagaimana perkembangan kegiatan sosial Nahdlatul Ulama cabang Purworejo pada periode 1952-1984 ?

C. Penjelasan Istilah.

Studi diskripsi yang dimaksud di sini adalah usaha mendiskripsi atau menggambarkan perkembangan kegiatan Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo pada periode 1952-1984. Dalam penelitian ini tidak digunakan hipotesa yang ketat melainkan hanya mendiskripsi informasi yang ada sesuai dengan variabel yang diteliti. Dengan kata lain studi diskripsi di sini hanya memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan menggunakan sumber informasi yang dapat ditemukan.

Nahdlatul Ulama (NU) lahir sebagai organisasi keagamaan, dengan maksud untuk menegakkan kehidupan beragama yang berlandaskan pada Ahlussunnah Wal Jamaah yang diartikan sebagai "pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma (kese

pakatan) ulama".⁸⁾ Dengan menyatakan diri sebagai pengemban tradisi, Nahdlatul Ulama membela kehidupan keagamaan yang telah dihayati oleh umat Islam di Indonesia, yaitu Islam yang telah menyerap berbagai tradisi keagamaan yang telah ada sebelumnya.

Menganutnya pada paham Ahlussunnah Wal Jamaah memberikan pengertian bahwa organisasi ini berbeda dengan golongan "modernis Islam" yang kendati mengklaim sebagai "pengikut tradisi nabi", tetapi menolak ijma ulama sebagai sumber ajaran. Paham Ahlussunnah Wal Jamaah yang dikembangkan Nahdlatul Ulama berpangkal pada tiga pandangan, yaitu: mengikuti Al Ashari dan Al Maturidi dalam bertauhid, menganut salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) ; dalam ber-fiqh (hukum Islam) dan mengikuti faham Al Junaidi, Al Baghdadi, serta Al Ghazali dalam tasawuf.⁹⁾ Dalam ber-fiqh Nahdlatul Ulama cenderung lebih berfihak pada mazhab Syafii yang dikenal mempunyai sifat fleksibel, terbuka dan adaptatif, sehingga ada yang menyebut sebagai "imam kaum moderat". Penerimaan dan kecenderungan pada mazhab Syafii ini menuntut Nahdlatul Ulama untuk menerima kehadiran tradisi lokal yang telah hidup dalam masyarakat Indoneasia, sepanjang hal itu berguna bagi pening-

⁸⁾ Abdurrahman Wahid, "NU dan Islam Dewasa ini", dalam Prisma 4 April 1980.

⁹⁾ Farouq Abu Zaid, Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis, (Jakarta : P3M, 1986), hlm.28.

katan penghayatan beragama.

Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan kegiatannya dilengkapi dengan perangkat organisasi, diantaranya Lembaga Otonomi. Lembaga Otonomi adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana harian kebijaksanaan Organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Adapun bidang yang dimaksud disini adalah bidang da'wah, bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang ekonomi.¹⁰⁾ Sesuai dengan kepengurusannya dalam bidang bidang tersebut maka kemudian muncul nama Lembaga Da'wah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial dan Lembaga Ekonomi. Lembaga yang disebut pertama dan kedua telah muncul jauh sebelum tahun 1952, sedang dua yang disebut kemudian baru muncul namanya setelah Nahdlatul Ulama berkhittah pada tahun 1984. Akan tetapi walaupun pada periode 1952-1984 nama Lembaga Sosial (Mabarrot) belum ada namun kegiatan sosial sudah ada sejak dahulu. Hal ini terungkap pada Anggaran Dasar pertamanya yang isinya bahwa Nahdlatul Ulama akan mengembangkan masalah yang berhubungan dengan bidang sosial.¹¹⁾

10) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo masa khidmad 1989-1993, tanggal 5- 6 Pebruari 1994, tanpa halaman.

11) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang mendapat pengesahan dari Pemerintah Belanda pada tanggal 6 Pebruari 1936, yang selengkapnya dapat dilihat dalam buku Choirul Anam, op.cit., pada III.

Lembaga Da'wah sebenarnya merupakan kelanjutan dari keinginan Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan pemahaman umat manusia terhadap ajaran Islam dalam semua segi kehidupan. Seperti diketahui bahwa salah satu motivasi keagamaan dari lahirnya Nahdlatul Ulama adalah reaksi terhadap kedatangan Belanda yang dianggap sebagai penyebar agama Kristen dan juga sebagai reaksi terhadap munculnya golongan modernis Muhammadiyah, oleh karenanya dikelak kemudian hari Nahdlatul Ulama tetap menempatkan kegiatan da'wah sebagai suatu kegiatan yang utama.¹²⁾

Lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama disebut pula Lembaga Ma'arif yang pembentukannya diputuskan pada munas Nahdlatul Ulama ke-13 di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Lembaga Ma'arif ini didirikan sekaligus dipimpin oleh KH.A. Wahid Hasyim putra pendiri organisasi ini yakni KH.Mohammad Hasyim Asy'ari. KH.A.Wahid Hasyim adalah seorang yang gigih dalam memperjuangkan Lembaga Ma'arif ini. Salah satu wujud dari kegigihan beliau adalah berhasil dimasukkannya kurikulum campuran yakni agama dan pendidikan umum.¹³⁾ Dalam Islam pendidikan memang mendapat tempat dan nilai yang tinggi, sebab belajar dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Adanya konsep ini menimbulkan tiga akibat penting, yaitu

12) Lihat tajuk rencana Majalah Islamiah NU yang berjudul, "Berita Nahdlatul Ulama", pada edisi Nomor:17.8.13 .J Awwal 1358 / 1 Juli 1939.

13) Choirul Anam, op.cit., hlm.59.

; satu, waktu yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan tidak dianggap hilang; dua, tidak ada sesuatu yang diharapkan (seperti ijazah) sebagai hasil belajar, kecuali sebagai ibadah kepada Allah; tiga, muncul dari keluarga tradisi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.¹⁴⁾

Oleh karena seperti dikemukakan diatas bahwa Lembaga Sosial baru terbentuk pada tahun 1984, maka penulis menggunakan istilah aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial untuk menyebut kedua lembaga tersebut. Aktivitas sosial ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata, demi kesejahteraan umat atas dasar perikemanusiaan dan akhlakkul Karimah¹⁵⁾ Semua masyarakat sebenarnya mau mengejar tujuan yang kurang lebih sama ,yakni kelangsungan hidup, prestise, rasa enak dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap anggota masyarakat harus berusaha menguasai sarana-sarana yang mempermudah pencapaian tujuan tersebut antara lain dengan uang, pendidikan dan pekerjaan. Pada hakekatnya untuk mencapai tujuan tersebut manusia membutuhkan manusia lain tetapi sekaligus kemudian menjadi pesaingnya. Sementara warga Nahdlatul Ulama sebagian besar yang sebagian berada di pedesaan adalah manusia yang kurang dapat bersaing dengan

14) Muslih Usa, (ed), "Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta Suatu Pengantar", dalam Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), hlm. 11.

15) Wawancara dengan bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

warga masyarakat lain. Akibat yang paling utama adalah tersingkirnya anggota masyarakat warga Nahdlatul Ulama ketika berusaha meraih tujuan. Dalam kaitannya dengan ini organisasi Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk mengangkat warganya dari keadaan yang selalu demikian dengan melalui kegiatan-kegiatan sosialnya.

Didasarkan pada studi pustaka dan latar belakang di atas mengenai perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama yang menjadi partai politik pada tahun 1952 dan kemudian berfusi dalam PPP pada tahun 1973 serta bertekad kembali menjadi organisasi keagamaan pada tahun 1984, maka penulis menggunakan tahun - tahun tersebut sebagai pembatasan waktunya. Sementara bidang - bidang seperti tersebut di atas yang telah ditetapkan oleh organisasi ini sejak awal berdirinya menjadi pokok pembicaraan pada skripsi ini. Sehingga tema lengkap dari skripsi ini adalah " Studi Diskriptif Sosial Keagamaan Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo periode 1952-1984, serta dibuat perbandingan perkembangan antara tahun 1952-1973 dengan tahun 1973-1984."

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah mendiskripsi dan menganalisis aktivitas Lembaga Otonomi Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo antara tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984. Se-

dangkan tujuan khusus dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendiskripsi perkembangan bidang da'wah, pendidikan, sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo kurun waktu 1952-1973.
2. Mendiskripsi perkembangan bidang da'wah, pendidikan, sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada kurun waktu 1973-1984.
3. Membandingkan perkembangan bidang da'wah, pendidikan, sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo antara tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini bermanfaat bagi penulis, organisasi Nahdlatul Ulama khususnya Cabang Purworejo, Universitas Sanata Dharma dan masyarakat umum. Bagi penulis, disamping untuk menambah khasanah pengetahuan, hasil penelitian ini juga dipergunakan untuk mengakhiri studi di Universitas Sanata Dharma. Sedangkan bagi organisasi Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo, hasil penelitian ini bisa dipergunakan untuk mengoreksi kekurangannya pada periode yang lalu, sehingga tidak mengulanginya pada masa yang akan datang serta mempergunakan kembali segala sesuatu yang telah dianggap baik. Sementara bagi Universitas Sanata Dharma, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah jumlah peneli-

tian sebagai manifestasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Masyarakat umum bisa mempergunakan penelitian ini untuk menilai perkembangan Nahdlatul Ulama khususnya Cabang Purworejo.

F. Metodologi Penelitian

Ilmuwan menggunakan metodologi atau cara ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Oleh karena skripsi ini merupakan suatu penelitian ilmiah, maka sudah seharusnya mempergunakan suatu metodologi atau cara ilmiah seperti yang dipergunakan para ilmuan tersebut diatas. Di bawah ini adalah metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Winarno Surachmad membagi jenis penelitian menjadi 3, yaitu: 1. Penelitian eksploratif yaitu penelitian penjajagan ; 2. Penelitian Eksplanatif yaitu penelitian untuk penjelasan ; 3. Penelitian diskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai populasi.¹⁶⁾

Menurut pembagian tersebut, penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran secara tepat tentang sifat, keadaan, gejala dalam kelompok tertentu. Penelitian diskriptif ini

16) Winarno Surachmad, op.cit., hlm.34.

tidak mempergunakan pengujian hipotesa yang ketat, karena hipotesa tersebut memang tidak mungkin bisa diuji.¹⁷⁾.

2. Metode Penelitian

Pada jenis penelitian di atas, diungkapkan bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif survey, maka metode yang dipergunakan adalah metode survey. Pada umumnya penelitian menggunakan metode survey dimaksudkan untuk mengetahui apa yang terjadi tanpa ingin mengetahui mengapa hal itu terjadi. Demikian pula penelitian mengenai perkembangan Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada tahun 1952-1984, penulis hanya ingin mengetahui apa yang terjadi pada periode tersebut tanpa ingin mengetahui mengapa hal itu terjadi. Beberapa langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan wawancara dan studi dokumen yang bisa ditemukan.
- b. Melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi wawancara dan studi dokumen.
- c. Analisa data dan penulisan laporan.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

17) Ibid., hlm. 35.

Berdasarkan data dan jenis informasi yang diperlukan, penelitian ini mengumpulkan data melalui:

a. Wawancara

Penulis mempergunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang utama, sebab dokumen maupun arsip yang ada dilembaga Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo sangat terbatas. Adapun penyebabnya adalah karena pada periode 1952-1984 organisasi tersebut belum tertata rapi walaupun telah memiliki gedung sekretariat yang cukup megah. Pada dasarnya mereka lebih mengutamakan berkarya daripada mengurus administrasi. Keadaan serupa sebenarnya bukan hanya dialami Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo saja, melainkan hampir di semua organisasi semacam ini. Slamet Efendy Yusuf, ketua GP Ansor pusat juga mengalami keadaan yang sama ketika hendak menulis tentang Nahdlatul Ulama secara lengkap, dan terulang lagi ketika seorang mahasiswa mendatangnya dengan maksud hendak menulis skripsi. Mahasiswa tersebut mendatangi Slamet Efendi Yusuf hendak meminta bantuannya untuk dapat memperoleh dokumen atau arsip tentang GP Ansor. Namun beliau tidak dapat memberikannya karena dokumen atau arsip tersebut memang tidak ada. Sebagai alternatif pemecahannya beliau menunjuk beberapa tokoh yang bisa memberikan keterangan secara lisan (wawancara) tentang perkembangan GP Ansor.¹⁸⁾

18) Slamet Efendy Yusuf, " Jejak ", dalam NU 1984-1989 (Kliping Berita dan Tulisan), (Jakarta: Lajnah Ta'lif Nasyr (LTN) bekerja sama dengan Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), 1989), hlm.165.

Kenyataan yang demikian menuntut penulis untuk mencari tokoh yang bisa dijadikan sebagai nara sumber. Namun dari studi pendahuluan yang telah penulis lakukan ditemukan persepsi sementara bahwa tokoh-tokoh yang bisa dijadikan sebagai nara sumber hanya sedikit. Adapun penyebabnya adalah karena sebagian dari mereka sudah wafat dan yang masih hidup kesehatannya tidak memungkinkan untuk diajak wawancara. Oleh karena itu selain beberapa tokoh yang masih bisa ditemui penulis juga mempergunakan tokoh tokoh yang masih tergabung dalam organisasi seperti ; Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo periode 1994-1999, ketua Lembaga Otonomi pada periode yang sama dan ketua Lembaga Otonomi pada periode 1989-1999.

b. Studi Dokumen

Oleh karena dokumen yang tertulis sifatnya sangat terbatas, maka studi ini dipergunakan untuk melengkapi keterangan yang telah diberikan oleh nara sumber.

c. Studi Kepustakaan

Data yang telah diperoleh dari wawancara dan studi dokumen selanjutnya dilengkapi dengan data yang ada dipustaka. Kepustakaan ini ditekankan pada penggunaan buku-buku, majalah, surat kabar dan karya lain yang dapat dipeertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan untuk mendukung suatu hasil penelitian.

4. Tehnik Analisa Data.

Penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif, sehingga analisa data yang dipakai adalah diskriptif analitis. Diskriptif analitis ini dipakai untuk mengolah data yang dikumpulkan. Untuk menganalisa data dipergunakan kritik sumber dan interpretasi data. Hasil yang diperoleh dari analisa data adalah fakta-fakta yang kemudian dikembangkan satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu perangkat yang menggambarkan suatu hasil penelitian.

5. Sistematika Penulisan

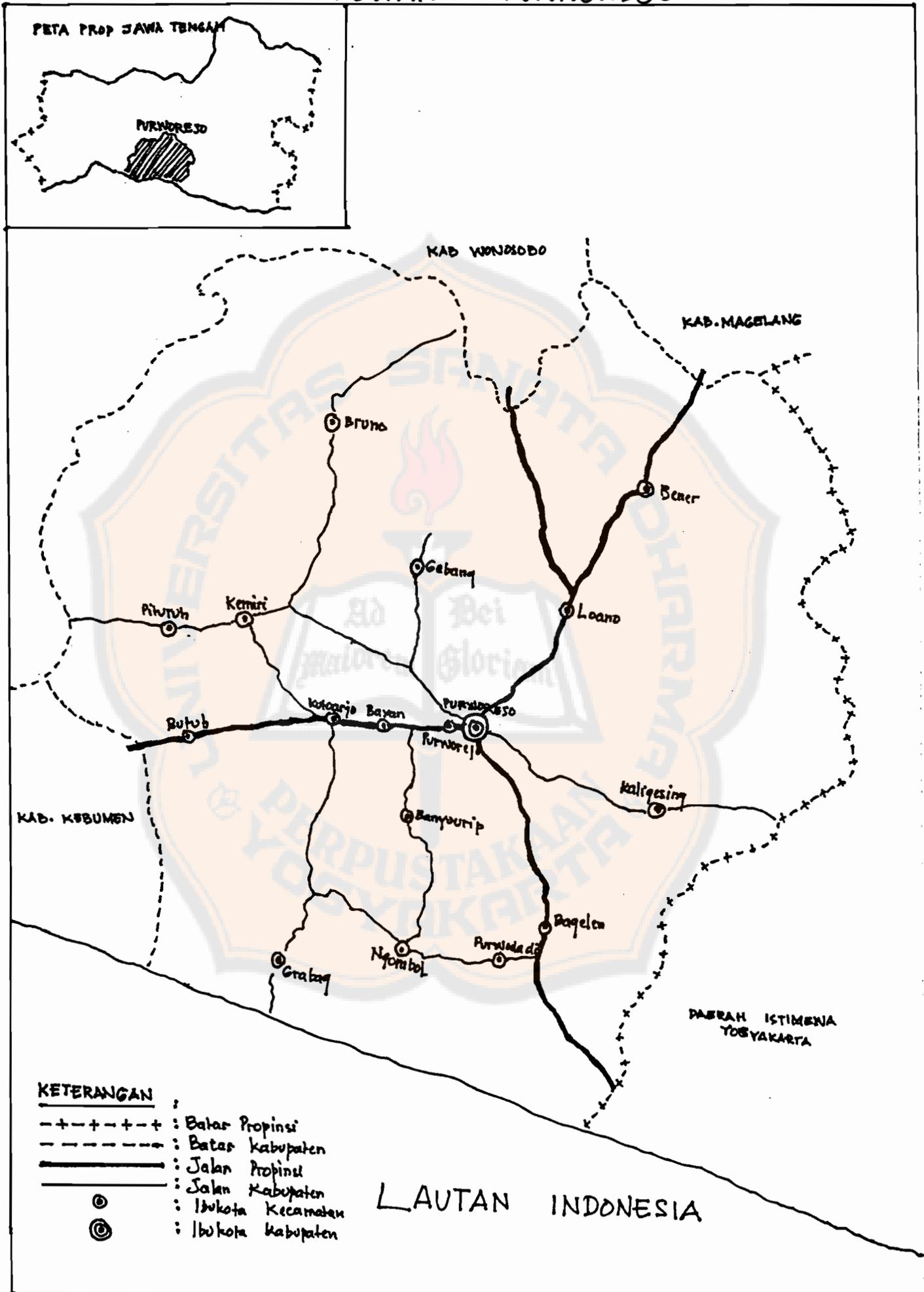
Pada bab I, penulis menguraikan mengenai alasan penelitian ini dilakukan, metodologi, tujuan, landasan teori, manfaat penelitian serta metodologi yang digunakan. Bab II menguraikan diskripsi singkat mengenai wilayah kabupaten Purworejo dengan tujuan agar pembaca memiliki gambaran tentang kabupaten Purworejo sehingga ketika membaca bab selanjutnya akan menjadi lebih jelas. Dalam bab III membicarakan aktivitas da'wah, pendidikan dan sosial yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo pada periode 1952-1984 dan dalam bab ini dibuat pula perbandingan perkembangan aktivitas da'wah, pendidikan dan sosial pada tahun 1952-1972 dan tahun 1973-1984. Kemudian pada bab IV adalah penutup yang memberikan sedikit kesimpulan tentang hasil penelitian.

Adapun maksud dibuatnya perbandingan perkembangan dalam bidang-bidang tersebut adalah untuk lebih memudahkan

bagi pembaca dalam melihat perkembangan yang dialami oleh lembaga-lembaga tersebut. Apabila tidak dibuat perbandingan perkembangan tentunya pembaca harus menganalisis sendiri mengenai perkembangan yang terjadi dalam bidang da'wah, pendidikan, sosial . Dengan dibuatnya perbandingan perkembangan ini pembaca akan lebih mudah memahami perkembangan yang terjadi dalam bidang tersebut di atas.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PETA KABUPATEN PURWOREJO



BAB II

DISKRIPSI SINGKAT WILAYAH KABUPATENPURWOREJO

A. Letak Geografi dan Keadaan Alam

Kabupaten Purworejo merupakan wilayah propinsi Jawa Tengah di bagian selatan. Berdiri 8 Agustus 1950 dengan dasar hukum UU No.13 / 1950. Wilayah kabupaten Purworejo ini berbatasan dengan kabupaten Megelang di sebelah timur laut, kabupaten Kebumen di sebelah barat, kabupaten Wonosobo di sebelah utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (kabupaten Kulon Progo) di bagian Timur dan Lautan Indonesia di bagian selatan. Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 kecamatan yaitu kecamatan Gebang, kecamatan Loano, kecamatan Bener, kecamatan Kaligesing, kecamatan Purworejo, kecamatan Bagelen, kecamatan Ngombol, kecamatan Purwodadi, kecamatan Banyurip, kecamatan Bayan, kecamatan kutoarjo, kecamatan Butuh, kecamatan Pituruh, kecamatan Kemiri, kecamatan Grabag dan kecamatan Bruno. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 1.034,80 km persegi (3,02 % luas propinsi). Secara lebih terperinci mengenai luas wilayah dari 16 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut dalam kilo meter persegi: kecamatan Bagelen 63,76 , kecamatan Banyuurip 44,52 , kecamatan Bayan 43,07, kecamatan Bener 93,98 , kecamatan Butuh 43,90 , kecamatan Bruno 99,03 , kecamatan Gebang 71,77 , kecamatan Grabag 64,65 , kecamatan Kaligesing 83,66 , kecamatan Kemiri 90,27 , kecamatan Kutoarjo 39,73 , kecamatan Loano 55,54 ,

kecamatan Ngombol 55,27 , kecamatan Pituruh 71,47 , kecamatan Purwodadi 53,36 , kecamatan Purworejo 52,72.

Wilayah kabupaten Purworejo yang terdiri dari 16 kecamatan tersebut dilihat dari keadaan tanahnya dapat digolongkan menjadi 3 yaitu tanah pegunungan, pategalan, dan persawahan. Kecamatan yang memiliki daerah pegunungan antara lain Gebang, Bener, Loano, Kaligesing, Pituruh, Kemiri dan Bruno. Sedangkan kecamatan yang wilayahnya sebagian besar pategalan adalah Purworejo, Bayan, Kutoarjo dan Banyurip. Sementara kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berupa persawahan adalah Bagelen, Ngombol, Purwodadi, Grabag dan Butuh.

Oleh karena wilayah yang dimiliki berbeda-beda maka mata pencaharian masyarakat dipedesaan tersebutpun berbeda-beda pula dalam arti masih bidang pertanian. Masyarakat di daerah pegunungan lebih cenderung pada tanaman keras seperti kelapa, durian, cengkih, kopi atau yang lainnya. Tanaman jenis ini terutama dapat ditemui di kecamatan Kaligesing, kecamatan Gebang ataupun kecamatan Bruno. Dilihat dari keunggulan tanaman pada beberapa kecamatan di daerah ini rupanya kecamatan Kaligesing lebih memiliki keunggulan dengan duriannya. Memang durian Kaligesing kemudian menjadi salah satu ciri khas kabupaten Purworejo. Sementara daerah yang memiliki wilayah persawahan lebih cenderung mengolah sawahnya dengan tanaman padi atau palawija. Daerah yang berada diantara persawahan dan pegunungan tersebut, yang

kemudian penulis beri nama daerah pategalan juga mengembangkan wilayahnya dengan tanaman palawija.

Berbicara mengenai tanah di kabupaten Purworejo sebagian besar dapat dikatakan masih relatif subur, terbukti dengan hasil tanamannya yang cukup melimpah. Dari hasil bumi ini masyarakat kemudian bisa hidup yang cukup makmur dalam arti untuk tingkat pedesaan. Dikatakan pada tingkat pedesaan karena sebagian besar wilayah kabupaten Purworejo adalah pedesaan.

B. Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk 1990 diketahui bahwa jumlah penduduk kabupaten Purworejo berjumlah 710.073 jiwa dengan komposisi, Pria ; 347.639 jiwa dan wanita ; 362.434 jiwa. Adapun perincian dalam tiap kecamatan adalah sebagai berikut ; kecamatan Bagelen 35.541 , kecamatan Banyuurip 36.644 , kecamatan Bayan 45.640 , kecamatan Bener 47.872 , kecamatan Butuh 43.082 , kecamatan Bruno 36.444 , kecamatan Gebang 37.891 , kecamatan Grabag 46.818 , kecamatan Kaligesing 37.228 , kecamatan Kemiri 50.306 , kecamatan Kutoarjo 61.579 , kecamatan Loano 33.638 , kecamatan Ngombol 55,27 , kecamatan Pituruh 48.733 , kecamatan Purwodadi 37.603 , kecamatan Purworejo 33.459.

Penduduk wilayah kabupaten Purworejo 90% berada di pedesaan dan hidup sebagai petani. Oleh karena itu dengan keadaan alam seperti yang dikemukakan di atas sangat memban-

tu penduduk untuk mencari nafkah. Dari pengamatan penulis, dapat dikatakan bahwa tidak semua penduduk kabupaten Purworejo kemudian berdiam diri di daerah ini. Sebagian besar dari usia produktif ini ikut terlibat dalam arus urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya maupun Tangerang.

Oleh karena itu pada hari-hari biasa keadaan masyarakat kabupaten Purworejo tidak seramai pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebagian besar dari mereka yang merantau pada hari raya ini pulang ke kampung halamannya dengan membawa hasil yang cukup banyak. Dalam keadaan yang demikian kota Purworejo menjadi sangat ramai, apalagi untuk daerah-daerah wisata yang ada di kabupaten Purworejo ini. Daerah wisata yang dimaksud adalah Curug Muncar (kecamatan Bruno), Goa Kiskendo (kecamatan Kaligesing), Pantai Congot (kecamatan Purwodadi dan Pantai Ketawang (kecamatan Grabag). Pada saat-saat Hari Raya Idul Fitri atau sesudahnya, masyarakat seperti sudah mentradisi untuk pergi ke tempat wisata seperti tersebut di atas. Disamping untuk menikmati keindahan alam pergi ke tempat tersebut juga dimaksudkan untuk menikmati hiburan yang disajikan di daerah itu.

Bagi anggota masyarakat yang tidak ikut berurbanisasi ke kota-kota besar tersebut, mereka tetap bekerja sebagaimana layaknya kaum petani. Selain bertani mereka juga memelihara ternak seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, itik dan lain

sebagainya. Ternak yang mereka pelihara rata-rata antara 1-2 untuk jenis sapi dan kerbau, 5-8 untuk jenis kambing dan 10-20 untuk jenis ayam dan itik. Memang pada saat penelitian ini dilakukan sudah ada diantara mereka yang memelihara ternak seperti tersebut di atas dan mereka bisa dikatakan sebagai peternak. Mereka yang demikian ini jumlahnya belum banyak, bahkan dalam 1 desa belum ada sama sekali. Satu hal yang perlu dikatakan dalam masalah peternakan ini adalah mengenai kambing etawa di kecamatan Kaligesing yang mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para pejabat tinggi ataupun dari negara lain. Jenis kambing ini memang besar dan tinggi, sehingga menghasilkan daging ataupun susu yang banyak.

C. Pendidikan

Pendidikan yang diperoleh masyarakat kabupaten Purworejo sebenarnya sudah cukup tinggi terlihat dari banyaknya pegawai maupun lembaga pendidikan yang ada di kabupaten ini. Sarana pendidikan yang diberikan pemerintah sudah cukup banyak sehingga cukup memenuhi syarat apabila kota ini disebut kota pendidikan. Julukan ini memang mungkin dianggap tidak tepat tetapi apabila dilihat dari jumlah sekolah baik SD, SLTP maupun SLTA-nya kiranya bisa memenuhi syarat untuk disebut sebagai kota pendidikan dalam arti yang sempit.

Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, kabupaten Purworejo telah memiliki 2 buah Perguruan Tinggi yang juga



telah menghasilkan banyak intelektual-intelektual muda. Dua perguruan Tinggi yang dimaksud adalah IKIP Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU). Pada Perguruan Tinggi ini dapat di jumpai mahasiswa yang bukan saja berasal dari kabupaten Purworejo tetapi juga dari daerah lain seperti Kebumen, Wonosobo, Cilacap ataupun Banjarnegara.

Sementara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk tingkat SD - SLTA sampai saat penelitian ini dilaksanakan masih mengalami perkembangan yang agak lambat walaupun bisa berjalan tertib. Dari data yang penulis peroleh dapat di ketahui bahwa jumlah sekolah yang dimiliki Nahdlatul Ulama kabupatena Purworejo ada 11 sekolah dengan rincian 4 SMP, 1 MTS, 2 SMA, 1 SMEA, 3 MI. Jumlah siswa secara keseluruhan 944 dengan rincian 449 siswa SMP, 32 siswa MTS, 186 siswa SMA, 77 siswa SMEA dan 200 siswa MI. Sementara jumlah guru dan karyawan secara keseluruhan berjumlah 192 orang.

Adanya beberapa kendala yang menghambat lajunya perkembangan sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama pada saat penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1). Kurangnya kesadaran dari sebagian warga akan pentingnya pendidikan yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah (aswaja), 2). Kurangnya tenaga guru umum yang profesional, 3) Minimnya dana yang ada. Salah satu bentuk dari kurangnya fasilitas di lingkungan Lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama

ditunjukkan dengan gedung yang belum memadai. Dari 11 sekolah yang ada baru 2a diantaranya yang memiliki gedung, sementara yang lain dalam taraf pembuatan dan penyewaan.

D. Agama

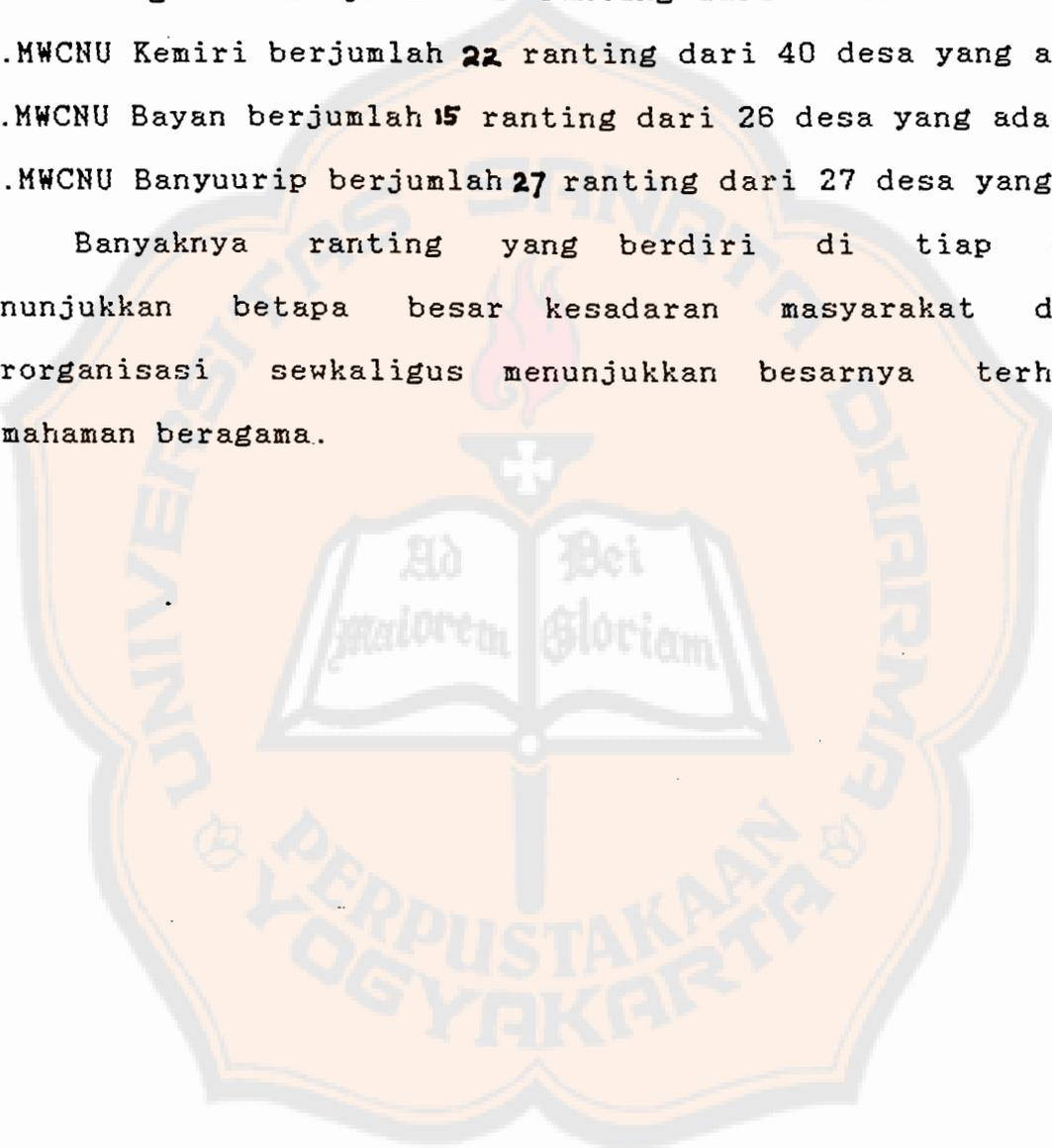
Agama yang dianut oleh sebagian masyarakat kabupaten Purworejo adalah Agama Islam. Mengenai pemahaman terhadap agama Islam ini sudah cukup maju dibandingkan pada masa-masa lalu. Dari 90 % yang beragama Islam sebagian besar dari mereka adalah warga Nahdlatul Ulama. Sehingga banyak adat yang telah ada sejak jaman dahulu masih dikembangkan oleh masyarakat di kabupaten Purworejo pada masa ini.

Perkembangan sistem keagamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama pada saat penelitian ini dilaksanakan ditunjukkan dengan munculnya jumlah ranting di setiap MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama). Perkembangan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut :

- 1.MWCNU Bener berjumlah 25 ranting dari 28 desa yang ada .
- 2.MWCNU Loano berjumlah 15 ranting dari 21 desa yang ada.
- 3.MWCNU Purworejo berjumlah 10 ranting dari 25 desa yang ada
- 4.MWCNU Kaligesing berjumlah 13 ranting dari 25 desa.
- 5.MWCNU Kutoarjo berjumlah 9 ranting dari 27 desa yang ada.
- 6.MWCNU Bruno berjumlah 17 ranting dari 18 desa yang ada.
- 7.MWCNU Bagelen berjumlah 10 ranting dari 17 desa yang ada.
- 8.MWCNU Purwodadi berjumlah 7 ranting dari 40 desa yang ada.
- 9.MWCNU Gebang berjumlah 23 ranting dari 25 desa yang ada.

- 10.MWCNU Butuh berjumlah 13 ranting dari 40 desa yang ada.
- 11.MWCNU Pituruh berjumlah 10 ranting dari 47 desa yang ada.
- 12.MWCNU Grabag berjumlah 31 ranting dari 31 desa yang ada.
- 13.MWCNU Ngombol berjumlah 13 ranting dari 57 desa.
- 14.MWCNU Kemiri berjumlah 22 ranting dari 40 desa yang ada.
- 15.MWCNU Bayan berjumlah 15 ranting dari 26 desa yang ada.
- 16.MWCNU Banyuurip berjumlah 27 ranting dari 27 desa yang ada

Banyaknya ranting yang berdiri di tiap desa menunjukkan betapa besar kesadaran masyarakat dalam berorganisasi sekaligus menunjukkan besarnya terhadap pemahaman beragama.



BAB III

KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN NU KABUPATEN PURWOREJO

A. Kegiatan Bidang Da'wah

1. Pengertian Da'wah dan Kepastian Hukum

Secara garis besar, da'wah Islam ada 2 pola pengertian yang hidup dalam masyarakat yakni, pertama, da'wah diberi pengertian sebagai tabligh/ penyiaran/ penerangan agama, kedua, da'wah diberi pengertian sebagai semua usaha untuk merealisasikan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia.¹⁹⁾ Pengertian da'wah pertama sebenarnya sangat sempit untuk menyebut sebagai kegiatan da'wah, sebab pengertian tersebut memberikan kriteria da'wah hanya sebagai seorang da'i yang aktif berceramah dan berkhotbah lewat mimbar-mimbar. Sedangkan mereka yang aktif merealisasikan ajaran Islam lewat berbagai kegiatan, namun tidak melakukan khotbah atau ceramah tidak dapat dimasukkan dalam kategori da'wah ini. Sementara pengertian da'wah yang kedua memberikan pengertian bahwa da'wah tidak identik dengan tabligh, melainkan meliputi semua usaha untuk mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan. Terlepas dari pengertian pertama dan kedua, kriteria awal dari kegiatan disebut da'wah, jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan orang

19) Amrullah Achmad, "Da'wah Islam dan Perubahan Sosial ; Suatu kerangka Pendekatan dan Permasalahan", dalam Da'wah Islam dan perubahan Sosial, (Yogyakarta : Prima Duta, 1983), hlm.6.

beriman dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan sosio-kultural. Sedangkan tabligh memiliki pengertian sebagai sistem usaha menyiarkan dan menyampaikan ajaran Islam agar "dipeluk" individu dan masyarakat yang dilakukan oleh individu ataupun kolektif, baik dilakukan secara lisan maupun lewat tulisan.²⁰⁾ Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa tabligh merupakan bagian dari sistem da'wah Islam.

Kegiatan da'wah didasarkan pada firman Allah dalam surat An Nahl ayat 125 yang artinya ;

Berda'wahlah (ajaklah) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, serta bertukarpikiranlah dengan mereka sebaik baiknya.²¹⁾

Dan sabda Nabi Muhammad saw yang dalam bahasa Indonesia berbunyi ;

"Bertablighlah (sampaikanlah) dari padaku walaupun hanya satu ayat saja."²²⁾

Dengan turunnya ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, menjadikan da'wah sebagai suatu kewajiban bagi semua umat Islam. Berkaitan dengan kewajiban da'wah bagi setiap muslim, TK Ismail mendasarkan pada tata bahasa bahwa kata da'wah maupun tabligh diucapkan dengan lafal amar (fi'il amr) yang berarti suruhan atau perintah. Sedangkan setiap perintah atau suruhan adalah wajib atau fardlu, sehingga

20. Ibid, hlm.7.

21) Zaenuddin dan Fachruddin, Tafsir Al Qur'an, (Jakarta : Widjaja, 1959), hlm.196.

22) Amrullah Achmad, op.cit, hlm.8.

da'wah atau tabligh bersifat wajib atau fardlu dan sekurang-kurangnya sunnat.²³⁾

Selain dasar hukum atau kepastian hukum menurut Al Qur'an dan Al Hadist, dalam negarapun da'wah memiliki kepastian hukum. Secara resmi kepastian hukum itu tertuang dalam SK menteri Agama RI no.44 dan Intsruksi Menteri Agama RI no.9 tahun 1978 , yang isinya adalah untuk melaksanakan da'wah tidak perlu mendapat ijin dari pemerintah terlebih dahulu melainkan langsung dapat melaksanakannya.

2. Aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984

Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama dalam kurun waktu 1952-1984 yang menunjukkan kurun waktu yang cukup panjang tentu banyak mengalami perubahan baik yang bersifat kenaikan maupun penurunan. Pembicaraan mengenai Lembaga da'wah ini tidak mungkin melepaskan diri dari pembicaraan mengenai komponen-komponen da'wah yang meliputi pelaku da'wah, sasaran da'wah, media da'wah, metode da'wah, lokasi da'wah dan materi da'wah. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai perkembangan aktivitas Lembaga Da'wah pada tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984 dengan komponen-komponennya.

²³⁾ TK Ismail Yacub, " Da'wah Islam dan Kepastian Hukum", dalam Amrullah Achmad (ed), op.cit, hlm.103.

a. Pelaku Da'wah

Pelaku da'wah adalah orang yang sering melakukan da'wah atau lebih dikenal dengan sebutan da'i. Dalam pelaksanaan da'wah, da'i memegang peranan yang sangat penting, bahkan sering disebut sebagai agent of change.²⁴⁾ Sesuai dengan namanya, Lembaga Da'wah sudah barang tentu dalam lembaga ini banyak terkumpul banyak da'i yang siap melakukan aktivitasnya. Namun demikian, untuk menjadi da'i seseorang harus memenuhi persyaratan, antara lain :

- a. Seorang da'i harus berilmu, harus cinta ilmu dan berusaha mengamalkannya. Seorang da'i harus mengerti apa yang dikatakan, sekalipun tidak harus mengatakan apa saja yang ia mengerti. Ia harus mengetahui kapan dan dimana ia harus bicara, sebagaimana ia harus mengetahui tentang apa, kapan dan dimana harus tidak berbicara.
- b. Seorang da'i harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Islam yang dipeluknya adalah agama yang benar. Dalam kaitannya dengan itu iman seorang muslim diibaratkan "pelita" yang harus tetap menyala dan harus menerangi kanan kirinya. Kurangnya keyakinan bahwa agama Islam yang dipeluknya benar, akan berakibat orang itu malu untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan agamanya.

²⁴⁾ Ibid., hlm. 104.

- c. Tingkah laku seorang da'i harus merupakan contoh dan teladan yang baik bagi orang lain. Seringkali perbuatan yang baik itu lebih ampuh pengaruhnya bagi orang lain daripada kata-kata yang baik.²⁵⁾

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, untuk menjadi seorang da'i masih dituntut persyaratan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo. Adapun persyaratan tersebut adalah tergabungnya orang tersebut dalam Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo.²⁶⁾ Para da'i di Kabupaten Purworejo ini lahir dari 3 proses yakni :²⁷⁾

- a. Da'i yang lahir dari pondok pesantren.
- b. Da'i yang lahir karena tuntutan sejarah.
- c. Da'i yang lahir secara otodidak.

Perkembangan da'i pada periode 1952-1973, menurut bapak Muhtarom, BA sangat baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya da'i yang ada. Di samping itu sebagian besar para da'i pada periode ini adalah para kyai yang memiliki langgar dan

25) A. Mukti Ali, Faktor-faktor Penjiaran Islam, (Jogjakarta: Jajasan Nida, 1971), hlm.11-12.

26) Wawancara dengan Bapak Muhtarom, BA, seorang da'i sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada periode 1967- sekarang. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

27) Ibid.

mengajar ngaji. Dengan demikian perkembangan da'wah sudah barang tentu lebih lancar karena mempunyai basis kelompok pengajian. Beberapa da'i yang tergabung dalam periode ini adalah ; KH.Muh Naji, KH.Jamil, KH.Asnawi Umar, KH.Dahlan, KH.Miftah Moehtar, KH.Nawawi Siddiq, KH.Iskak Mansyur, KH.Askuri, KH.Cholil Sunhaji, Kyai.Mahfud Achmad, KH.Habib Hasan Al Ba'bud, KH.Asnawi Dahlan,dan KH.Chalwani Nawawi. Disamping itu juga ada beberapa orang mubalighod (mubaligh wanita) yang tergabung dalam Lembaga Da'wah pada periode ini. Mubalighod yang dimaksud antara lain ; Nyai Dawiyah Ridwan,Ibu Siti Asiyah Jamil,Nyai Syarifah Syekhah dan Nyai Sholekhah Saefuddin Zuhri.

Sedangkan para da'i pada periode 1973-1984 sebagian besar dari mereka bukanlah para kyai yang memiliki langgar serta mengajar ngaji. Beberapa diantara mereka bahkan tidak mau disebut dirinya sebagai kyai namun mereka ikut tergabung dalam Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo dan menjadi seorang da'i dengan caranya tersendiri.Adapun para da'i yang bisa dimasukkan pada periode ini antara lain ;Judi,BA, Drs.Moeh.Soeripto, Muhtarom,BA, KH.Cholil Sidiq, KH.Abdullah, Kyai Hamid Anwar, Kundari,BA,dan KH.Chairil Adhan. Sementara mubalighod yang masih bisa dimasukkan dalam periode ini adalah ibu Siti Asiyah Jamil.

Selain menjadi da'i di kabupaten Purworejo beberapa orang da'i yang di sebut di atas cukup terkenal di tingkat regional bahkan ada yang terkenal sampai tingkat nasional.

Beberapa da'i yang terkenal di tingkat regional adalah KH.Asnawi Cholil, KH.Habib Hasan Al Ba'bud serta Kyai Asnawi Dahlan untuk periode 1952-1973 dan Kyai Hamid Anwar, KH.Cholil Sidiq untuk periode 1973-1984. Sedangkan da'i yang terkenal sampai tingkat nasional adalah KH.Chalwani Nawawi.²⁸⁾

b. Sasaran Da'wah

Sasaran da'wah adalah orang atau masyarakat yang dituju oleh suatu kegiatan da'wah. Sementara orang atau masyarakat yang dituju memiliki bermacam-macam karakteristik, sehingga para da'i harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Berkaitan dengan hal ini maka seorang da'i tidak boleh mencampuradukkan antara materi da'wah untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Pendek kata seorang da'i harus memperhatikan keadaan sasaran da'wah.

Sasaran da'wah yang utama bagi para da'i baik pada awal periode ini sampai menjelang meletusnya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) :

- a. Masyarakat warga Nahdlatul Ulama di Purworejo.
- b. Masyarakat Islam pada umumnya

Sasaran da'wah yang agak memiliki kekhususan terjadi sekitar tahun 1965, yang mana Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo lebih memfokuskan pembinaannya pada masya

²⁸⁾ Wawancara dengan Bapak Muhtarom, BA pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

rakat Nahdlatul Ulama yang telah dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa warga Nahdlatul Ulama yang usianya menjelang atau sudah dewasa merupakan sasaran penyebaran ide-ide PKI, sehingga warga yang kadar keimanannya masih dalam tingkat rendah apalagi masih awam sekali maka dengan mudah terseret dalam bujuk rayu PKI tersebut. Dijelaskan oleh Bapak Kyai Jumali bahwa sebagian besar wilayah kabupaten Purworejo adalah "daerah merah" atau daerah PKI dengan markas besarnya di Gedung Veteran (sekarang di Jalan Veteran). Menurut tokoh Nahdlatul Ulama ini, menjelang meletusnya G 30 S/ PKI, semangat ibadah umat Islam menurun sekali bahkan ada beberapa diantara mereka yang merasa malu mengaku beragama Islam.²⁹⁾

Dalam keadaan semacam ini Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo berusaha mengembalikan keimanan warganya dengan memfokuskan pembinaannya pada warga yang menjelang dan sudah dewasa. Adapun bentuk pembinaan dalam rangka meningkatkan aqidah adalah melalui cara ; a. Mengadakan pengajian di berbagai tempat, b. Memberikan penyuluhan tentang Pancasila, c. Mengadakan Mujahadah (penggemlengan) kepada para pemuda, d. Memberikan penanaman loyalitas kepada

29) Wawancara dengan bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

negara dan pemerintah yang sah.³⁰⁾

Sasaran da'wah ini ternyata lebih dirasa berat dibandingkan ketika sasaran da'wah dalam keadaan tanpa gejolak. Tantangan yang berat muncul dari dua belah pihak baik pihak warga Nahdlatul Ulama yang telah teracuni ide PKI sendiri maupun dari pihak PKI. Akan tetapi berkat usaha yang keras dan ridlo dari Allah akhirnya mereka berhasil mengentaskan para warga yang telah tergelincir dalam kegiatan PKI.

Setelah PKI berhasil dihancurkan dan keadaan masyarakat tenang kembali, maka sasaran da'wahpun diarahkan pada orang atau masyarakat seperti keadaan sebelum PKI bergejolak dan menyebarkan ide-idenya. Pada periode 1973-1984 sasaran da'wah tidak mengalami hambatan dan tantangan yang cukup berat seperti pada periode sebelumnya. Oleh karena para da'i ini adalah orang-orang yang sudah cukup berpengalaman maka mereka dengan sendirinya telah mampu menyesuaikan diri ketika menghadapi sasaran da'wah. Disamping itu karena kesibukan para da'iyah yang kemudian lebih memberatkan diri berkecimpung dalam bidang politik maka pada periode 1973-1984 sasaran da'wah seperti sebelum tahun 1965.

30) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali mantan Sekretaris Lembaga Ma'arif Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Ma'arif Cabang Purworejo periode 1957-1967. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

c. Media Da'wah

Media da'wah adalah sarana yang secara langsung digunakan oleh para da'i dalam berda'wah. Media da'wah ini digunakan untuk lebih membantu pelaksanaan da'wah dan sekaligus sebagai alat penghubung antara dua belah pihak yakni antara da'i dan penerima da'wah.

Selama periode 1952-1973, Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo menggunakan media da'wah berupa ;

- a. Sekolah, madrasah dan pondok pesantren.
- b. Memanfaatkan hari-hari besar Islam seperti Mauludan, Rajaban, Syawalan, dan lain-lain.

Sedangkan pada periode 1973-1984, Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama cabang Purworejo menambah media lagi selain media yang telah digunakan pada periode sebelumnya. Adapun media yang dimaksud adalah didirikannya LESBUMI (Lembaga Seniman Budayawan Islam) yang dipimpin oleh Bapak Muhtarom, BA dan Bapak Dimiyati Arifin. Dalam LESBUMI ini dimunculkan banyak pentas seni seperti drama Islam dan Markhabanan. Media ini sangat menarik minat masyarakat sehingga ketika masyarakat asyik menikmati hiburan tersebut, diselipkan juga pesan-pesan da'wah.

d. Metode Da'wah

Metode da'wah dilihat dari sifatnya bisa dibagi menjadi 2 yaitu metode lisan dan metode non lisan. Metode lisan

meliputi ceramah-ceramah dimimbar seperti dalam pengajian mingguan, pengajian akbar dan ceramah di masjid-masjid sewaktu Shalat Jum'at atau Shalat Jamaah lainnya. Metode jenis ini banyak sekali digunakan oleh para da'i baik di kota maupun di desa, sebab tidak membutuhkan dana yang besar. Metode non lisan berupa pemberian bantuan yang meliputi bantuan pendidikan, bantuan ketrampilan dan latihan, bantuan memperoleh pekerjaan dan jenis bantuan lain yang bisa menarik perhatian.

Ace Partadiredja memberikan satu alternatif penting yang menurut beliau sangat efektif sebagai salah satu metode da'wah yaitu melalui bantuan 6 kebutuhan pokok. Enam kebutuhan pokok yang dimaksud adalah makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.³¹⁾

Para da'i yang tergabung dalam Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada periode 1952-1973 sebagian besar menggunakan metode lisan yakni ceramah. Para da'i yang menggunakan metode ini antara lain ;KH.Muh Naji, KH.Jamil, KH.Asnawi Umar, KH.Dahlan, KH. Maftuh Mochtar, KH.Nawawi Sidiq, KH.Iskak Mansyur,KH.Askuri,KH.Cholil Sunhaji dan KH.Chalwani Nawawi. Metode ceramah yang dimaksud disini adalah para da'i memberikan ceramah pada massa yang jumlahnya cukup banyak.

³¹⁾Ace Partadiredja," Da'wah Islam melalui Enam Kebutuhan Pokok",dalam Amrullah Achmad,(ed), Da'wah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta : Prima Duta, 1983), hlm. 120.

Disamping metode ceramah di atas para da'i yang tergabung dalam Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada periode 1952-1973, juga menggunakan metode lain yakni:

1). Metode perorangan

Dalam penerapan metode ini jumlah massa yang dihadapi hanya sedikit bahkan bisa berupa perseorangan. Metode perorangan ini dilakukan melalui ; Majelis Ta'lim dan pengajian di pondok pesantren.

2). Metode Adaptasi budaya yang berdasarkan Aswaja

Adapun yang dimaksud metode adaptasi budaya yang berdasarkan Ahlussunnah Wal Jamaah adalah mempergunakannya budaya-budaya sebelum Islam yang cocok dengan agama Islam. Dengan menerapkan metode ini menjadikan sifat da'wah para da'i dari lingkungan Nahdlatul Ulama menjadi bersifat persuasif (menarik), inofatif, dan toleransi. Hal ini menjadikan da'wah yang tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

3). Metode Door to door

Metode ini dilakukan secara perseorangan lewat perdagangan yang dilakukan oleh Kyai Mahfud Achmad.

Metode ceramah yang sebagian besar dilakukan oleh para da'i perperiode 1952-1973 rupanya juga masih merupakan metode yang digemari oleh para da'i periode 1973-1984. Para da'i

yang mempergunakan metode ceramah ini antara lain ; Judi,BA, Drs.Moeh.Soeripto, Muhtarom,BA, KH.Cholil Sidiq, KH.Abdullah, Kyai Hamid Anwar, Kundari,BA, dan Chairil Adhan. Memang selain mempergunakan metode ceramah para da'i pada periode ini juga menerapkan metode lain seperti metode perorangan dan metode adaptasi budaya yang berdasarkan Ahlussunnah Wal Jamaah.Namun metode door to door seperti yang dilakukan oleh Kyai Mahfud Achmad tidak ada lagi yang mempergunakannya. 32)

e.Lokasi Da'wah

Lokasi da'wah adalah tempat tinggal dari sasaran da'wah atau tempat tinggal orang yang menjadi tujuan da'wah. Lokasi da'wah biasanya dibagi menjadi 2 yakni desa dan kota. Lokasi desa dan lokasi kota banyak memiliki perbedaan antara lain bila ditinjau dari pandangan hidup, pekerjaan, keadaan lingkungan, dan pendidikan warganya. Adanya perbedaan ini menuntut para da'i untuk menyesuaikan tentang isi, cara, dan analogi dalam berda'wah.

Da'wah yang dilakukan di daerah perkotaan memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi, sebab pada umumnya pendidikan masyarakat kota lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa. Kemampuan intelektual bagi para da'i ini bisa diperoleh dari pendidikan formal seperti IAIN ataupun perguruan

32) Wawancara dengan Bapak Muhtarom BA pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

tinggi lainnya. Disamping itu juga bisa diperoleh dengan pengalaman lama yang dimilikinya. Materi da'wahpun memerlukan penyesuaian dengan keadaan masyarakat kota. Tidak mengherankan apabila para da'i yang sering berda'wah di desa akan mengalami kegagalan ketika berda'wah di desa apabila tidak mau menyesuaikan diri.

Sementara da'wah di pedesaan juga memerlukan kemampuan da'i untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tradisi yang hidup di desa. Kemampuan intelektual yang tinggi tidak terlalu dituntut bagi da'i di pedesaan. Walaupun demikian, keadaan seperti ini juga sulit dilakukan oleh para da'i yang terbiasa berda'wah di kota, sebab penyesuaian diri juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Pembagian lokasi da'wah bagi para da'i sebenarnya sangat perlu untuk mengantisipasi keadaan seperti tersebut di atas. Namun karena situasi dan kondisi waktu itu, maka Lembaga Da'wah NU Cabang Purworejo belum melaksanakan pembagian lokasi da'wah baik pada periode 1952-1973 maupun periode 1973-1984. Dalam kaitannya dengan pembagian lokasi da'wah, Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo memberikan kebebasan kepada para da'i untuk berda'wah di mana saja dan kapan saja. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa para da'i telah mampu mengukur kemampuannya sendiri, sehingga apabila mereka mampu berda'wah di desa maka ia akan berda'wah di sana dan demikian juga sebaliknya.

Sementara yang penting untuk dikemukakan di sini ada-

lah mengenai pengklasifikasian atau komposisi warga Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan. Dalam hal ini Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo membaginya menjadi tiga kelompok yakni besar, sedang dan kecil. Adapun kecamatan yang tergolong memiliki warga Nahdlatul Ulama besar adalah Kecamatan Bruno, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener. Sedangkan yang masuk kategori warga Nahdlatul Ulama sedang adalah Kecamatan Butuh, Kecamatan Purworejo, kecamatan Banyurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Grabag ; sementara yang masuk kelompok kecil adalah Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Bagelen.

Pengklasifikasian ini khususnya berlaku untuk periode 1952-1973 dan awal periode 1973-1984. Pengklasifikasian ini sangat penting artinya bagi para da'i sebab bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan materi, metode dan media da'wahnya. Secara berangsur-angsur pengklasifikasian ini menjadi hilang ketika para da'i telah menyentuh semua wilayah kabupaten Purworejo, dan pada tahun 80-an semua kecamatan masuk kategori besar.

Apabila dibuat perbandingan antara lokasi desa dan lokasi kota maka hasil yang dicapai oleh para da'i sebagian besar berhasil di desa. Salah satu bukti yang kongkrit adalah berhasil diangkatnya beberapa kecamatan dari klasifikasi sedang dan kecil menjadi klasifikasi besar. Sedangkan dike

tahui bahwa sebagian besar kecamatan di kabupaten Purworejo adalah berupa pedesaan.³³⁾

f. Materi Da'wah

Da'wah Islam bersumberkan pada Al Qur'an dan Al Hadist ditambah dengan formulasi dari pemahaman terhadap Islam (ijtihad).³⁴⁾ Menurut Amrullah Achmad, Al Qur'an dan Al Hadist berfungsi sebagai pemberi petunjuk, pandangan hidup, penilaian keadaan (kritik sejarah), paradigma dalam melihat masalah-masalah hidup (individu maupun sosial), konsepsi dasar tentang berbagai segi kehidupan, segi kebenaran ilmu pengetahuan dan jalannya sejarah manusia.³⁵⁾

Pengembangan materi da'wah ditentukan oleh kemampuan para da'i dalam mengolah isi Al Qur'an dan Al Hadist. Apabila da'i tersebut mampu mengolahnya dengan baik maka tujuan da'wah akan lebih mudah bisa dicapai sebab materi yang disampaikan menjadi lebih menarik. Masyarakat sebagai lingkungan ataupun sebagai sasaran da'wah senantiasa mengalami peru-

33) Wawancara dengan Bapak Muhtarom, BA pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

34) Ijtihad berasal dari bahasa Arab "ijtihad" yang berarti bersungguh-sungguh, berusaha keras. Sedangkan menurut Istilah agama berarti mengerahkan kemampuan daya pikir untuk mengambil keputusan, kesimpulan atau menetapkan hukum dengan mengambil ketentuan dari Al Qur'an dan Al Hadist. Untuk lebih jelasnya lihat tulisan Amrullah Achmad dalam bukunya da'wah Islam dan Perubahan Sosial hlm.288.

35) Amrullah Achmad, op.cit., hlm.7.

bahan pada tatanan masyarakat baru yang lebih ideal.³⁶⁾ Dengan demikian aktualisasi da'wah berupa penataan masyarakat yang terus menerus di tengah perubahan sosial, sehingga tidak ada satu sudut kehidupanpun yang terlepas dari perhatian dan penggarapannya. Da'wah Islam senantiasa harus bergumul dengan keadaan baru yang pemunculannya kadangkala sulit diperhitungkan sebelumnya dan sangat mengharapkan penyelesaian para da'i. Keadaan yang demikian menuntut da'i untuk mampu mengolah materi da'wah agar tidak usang dan ketinggalan jaman.

Upaya yang dilakukan oleh oleh para da'i yang tergabung dalam Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama demi penyesuaian materi da'wah pada 2 periode tersebut dilakukan dengan cara belajar sendiri dari keadaan yang ada dalam masyarakat. Hal semacam ini ditempuh mengingat para da'i yang tergabung dalam Lembaga Da'wah ini sebagian besar terdiri dari para mu-baligh yang sudah kenyang pengalaman. Tanpa pembinaan yang rutinpun mereka akan mampu menyesuaikan materi da'wah dengan keadaan masyarakat. Pembinaan yang utama dilakukan apabila para da'i diharapkan untuk menyampaikan materi tertentu seperti pesanan pemerintah tentang KB ataupun ketika para da'i harus mengadakan pembinaan mental kepada masyarakat sewaktu PKI bergejolak.

36) Ibid, hlm. 8.

Materi da'wah secara umum berkisar pada :

- a. Usaha penanaman ketauhidan (keimanan) pada masyarakat.
- b. Penyempurnaan aqidah yang sudah berkembang pada warga.
- c. Penanaman hukum-hukum fiqih yang bersifat ritual seperti , syarat rukunnya Shalat, zakat, puasa dan haji.
- d. Pengembangan bidang muamalah (pergaulan).

3. Perbandingan Perkembangan Aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama cabang Purworejo Pada Periode 1952-1973 dan Periode 1973-1984

Untuk menganalisa atau mentelaah perkembangan aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada periode 1952-1973 dan periode 1973-1984, penulis mempergunakan dua dua cara yakni; pertama, pendapat langsung dari nara sumber; kedua, pengkajian hasil wawancara yang terhimpun dalam komponen-komponen da'wah.

Bapak Muhtarom, BA nara sumber utama dalam bidang da'wah memberikan penilaian tentang perkembangan Lembaga Da'wah dalam 2 periode tersebut di atas. Beliau menyatakan bahwa periode 1952-1973 aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo ternyata lebih berkembang dibanding periode 1973-1984. Alasan yang dikemukakan oleh beliau mengenai keadaan ini adalah :³⁷⁾

Pada periode 1952-1973 aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul ulama cabang Purworejo tidak menemui kendala yang

³⁷⁾Wawancara dengan bapak Muhtarom BA pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

bersifat menghambat, sedangkan pada periode 1973-1984 kegiatan Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama ini merasa di hambat oleh beberapa pihak. Disamping itu para da'i lebih banyak yang kemudian terjun ke bidang politik.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Kyai Jumali dan beliau menambahkan bahwa sejak tahun 1973 banyak terjadi ketakutan di kalangan da'i untuk bergerak menyampaikan da'wah nya.³⁸⁾

Hasil kajian penulis lewat komponen-komponen da'wah adalah sebagai berikut :

1. Pelaku da'wah

Jumlah da'i pada periode 1952-1973 ternyata lebih banyak dibandingkan periode 1973-1984. Disamping itu para da'i pada periode 1952-1973 sebagian besar terdiri dari para kyai yang memiliki langgar dan mengajar ngaji sehingga mereka telah memiliki basis tersendiri. Sedangkan para da'i pada periode 1973-1984 selain jumlahnya lebih sedikit mereka bukan berasal dari lingkungan kyai yang memiliki langgar dan mengajar ngaji, sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan intelektual sehingga basis seperti kyai tidak pernah mereka miliki.

2. Sasaran da'wah

Secara umum sasaran da'wah pada 2 periode ini tidak jauh berbeda, namun mengingat pada periode 1952-1973 terjadi

³⁸⁾Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 17 April 1994 di Purworejo.

peristiwa meletusnya Gerakan 30 September (PKI), yang membawa banyak perubahan maka sasaran da'wah menjadi berbeda dengan tahun sebelumnya dan periode sesudahnya. Sasaran da'wah pada periode 1952-1973 dirasa lebih berat, namun karena usaha yang keras dari para da'i, sasaran yang lebih berat ini bisa diatasi. Adanya peristiwa yang membuat sasaran da'wah menjadi lebih berat pada periode 1952-1973, namun bisa di atasi dengan baik menunjukkan kegiatan da'wah pada periode ini lebih berhasil dari pada periode sesudahnya.

3. Media da'wah

Dalam hal media da'wah, secara sepintas periode 1952-1973 lebih sedikit dibandingkan dengan periode 1973-1984. Apabila dalam periode 1952-1973 Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo hanya memiliki media sekolah, madrasah, pesantren dan memanfaatkan hari-hari besar Islam, maka pada periode 1973-1984 telah ditambah LESBUMI. Namun demikian pada periode 1973-1984 jumlah madrasah dan sekolah milik Lembaga Ma'arif mendai sangat berkurang bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karenanya walaupun telah bertambah dengan LESBUMI, jumlah media da'wah pada periode 1952-1973 tidak bisa dikatakan lebih sedikit dibanding periode sesudahnya.

4. Metode Da'wah

Penggunaan metode da'wah pada periode 1952-1973 rupanya lebih banyak dibandingkan dengan periode sesudahnya. Dalam periode 1952-1973 Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo menerapkan 3 metode da'wah yakni metode ceramah, metode adaptasi budaya dan metode door to door, sedangkan periode 1973-1984 metode door to door sudah tidak ada yang menerapkan. Kurangnya metode yang diterapkan berarti pula kurangnya variasi dalam berda'wah yang menyebabkan kejemuhan bagi penerima da'wah.

5. Lokasi da'wah

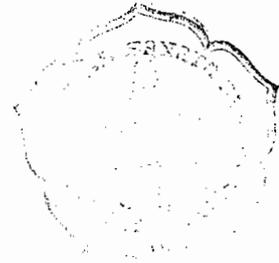
Mengenai lokasi da'wah, dalam dua periode tersebut tidak mengalami perubahan yang mendasar, sebab memang jangkauannya meliputi semua wilayah kabupaten Purworejo. Sedangkan pengklasifikasian yang dibuat oleh Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo hanya digunakan untuk mempermudah tentang pemilihan materi da'wah dan frekwensi pemberian da'wah.

6. Materi da'wah

Oleh karena sebenarnya materi da'wah sudah ada ketentuan seperti yang termuat dalam Al Qur'an dan Al Hadist, maka dalam hal ini tidak dapat diperbandingkan. Sementara yang membedakan dalam dua periode tersebut adalah mengenai penekanan pada point-point tertentu dalam materi da'wah.

Sebagai contoh, pada periode 1952-1973 khususnya menjelang meletusnya Gerakan 30 September / PKI point yang ditekankan adalah bidang keimanan atau ketauhidan. Sementara pada saat saat tanpa gejolak, point yang lain menjadi lebih diutamakan dibanding bidang keimanan.

Setelah melakukan pengkajian lewat komponen-komponen da'wah, dapat diungkap bahwa sebagian besar komponen da'wah lebih berkembang pada periode 1952-1973 dibandingkan periode 1973-1984. Mendasarkan pada pendapat dari nara sumber dan hasil wawancara yang terungkap kembali lewat pengkajian sederhana, dapat ditarik kesimpulan kasar bahwa aktivitas Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo periode 1952-1973 lebih berkembang dibandingkan periode 1973-1984.



B. KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Hakekat Pendidikan Versi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam Tradisional tertua di Indonesia senantiasa memperhatikan perkembangan bidang pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada sunnah Rasulullah yang berbunyi :

"Tidak ada pemisahan antara pemimpin agama dengan pemimpin negara dan karena itu dalam mempertinggi kualitas manusia dan menajadikan pemimpin umat maka persyaratannya bukan saja ilmu keagamaan (al ulumuddiniah) saja, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya termasuk saint dan teknologi (al umul kauniah).³⁹⁾

Atas dasar Hadist tersebut, maka Nahdlatul Ulama tidak semata mata menggeluti hanya ilmu keagamaan saja, melainkan meluaskan jangkauannya pada penguasaan ilmu lain. Namun dalam menjangkau pada penguasaan ilmu lain (umum) yang diterapkan pada lembaga pendidikannya, Nahdlatul Ulama bukan saja mendapat kritikan tetapi juga memperoleh tantangan yang hebat justru dari kalangan pendidik di lingkungan sendiri. Keadaan yang demikian dialami oleh KH.A.Wahid Hasyim ketika memperkenalkan konsep kurikulum campuran yakni agama dan umum. Memang bisa dimengerti karena pada saat itu, semangat anti Belanda telah memasuki sendi kehidupan masyarakat Nahdlatul Ulama yang mendalam. Oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan Belanda seperti memberikan mata pelajaran umum dianggap membahayakan umat Islam. Akan tetapi berkat

39) Permasalahan dan Jawaban Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta, tanggal 25-28 Nopember 1989, (Kudus: Menara Kudus, 1989), hlm.171.

kegigihan KH.A.Wahid Hasyim dalam memberikan pengertian dan penjelasan kepada para pendidik di lingkungan Nahdlatul Ulama, akhirnya konsep kurikulum campuran ini diterima oleh masyarakat Nahdlatul Ulama.⁴⁰⁾

Mochtar Buchori mengelompokkan pendidikan islam di Indonesia menjadi 4 jenis yakni:

1. Pendidikan Pondok Pesantren.

Pendidikan jenis ini merupakan pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional. Pendidikannya bertolak dari Al Qur'an dan Al Hadist serta merancang segenap pendidikannya untuk mengajarkan Islam sebagai cara hidup siswa.

2. Pendidikan Madrasah

Merupakan pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan model barat, yang mempergunakan metode klasikal dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup dalam diri siswa.

3. Pendidikan Umum yang bernafaskan Islam

Adalah pendidikan Islam yang dilakukan melalui pengembangan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum.

40) Choirul Anam, op.cit., hlm.106.

4. Pelajaran Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran.⁴¹⁾

Pendidikan pondok pesantren memiliki kekuatan sebagai lembaga pendidikan non formal yang dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada segenap umur dalam masyarakat. Pondok pesantren dapat mengembangkan program-program pendidikan agama dari tingkat anak-anak, dewasa maupun orang tua dan materi yang disampaikan menurut kebutuhan masing-masing. Sedangkan dilihat dari keterbatasannya, pendidikan pondok pesantren memiliki keterbatasan dimana pendidikan yang diberikan kepada masyarakat hanya terpusat pada soal-soal keagamaan saja. Sementara kebutuhan masyarakat luas akan kebutuhan pendidikan meliputi berbagai jenis bidang seperti kesehatan, pertanian, teknologi dan lain sebagainya. Satu hal lagi yang menjadi kelemahan dari pendidikan pondok pesantren adalah tentang ijazah atau sejenisnya yang tidak mendapat pengakuan dari pemerintah yang berarti penghargaan yang diberikan pondok pesantren tidak dapat dijadikan syarat untuk menjadi pegawai negeri apabila menginginkannya.⁴²⁾

41) Mochtar Buchori, "Pendidikan Islam di Indonesia: Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan", dalam Muntaha dan Abdul Mun'im Saleh (penyunting), Islam Indonesia Menatap Masa Depan, (Jakarta: P3M, 1989), hlm.184.

42) Muslih Usa, "Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta Suatu Pengantar", dalam Muslih Usa (ed), Pendidikan Islam Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm.1.

Madrasah dan sekolah umum yang bernaafaskan Islam merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang berbeda dengan model pendidikan pesantren. Mengenai umur dan tingkat kemampuan siswa tidak banyak perbedaan artinya umur dan kemampuan siswa antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelas rata-rata sama. Kandungan materi yang disampaikan dua lembaga pendidikan ini memiliki perbedaan, jika madrasah Diniyah menetapkan seluruh kandungan materinya agama dan madrasah lainnya (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) menetapkan 70 % pendidikan umum dan 30 % pendidikan agama, maka pendidikan umum yang bernaafaskan Islam mengikuti kurikulum pemerintah. Sementara perbedaan yang menyolok diantara keduanya terletak pada departemen yang menjadi atasannya. Madrasah baik Diniyah maupun yang lainnya terletak dibawah naungan Departemen Agama sedang sekolah umum yang bernaafaskan Islam berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengikuti penggolongan Muchtar Buchori di atas, Lembaga Pendidikan milik Lembaga Ma'arif hanya mencakup point 2 dan 3 saja. Memang pendidikan pondok pesantren termasuk dalam kelompok pendidikan Islam dan pondok pesantren sendiri banyak dimiliki oleh kabupaten Purworejo serta dengan sendirinya masuk dalam jajaran pendidikan yang ikut mengembangkan Aswaja, namun lembaga pendidikan pesantren ini berdiri sendiri dan tidak berada dibawah naungan Lemabaga Ma'arif. Oleh karena fokus pembicaraan dalam penelitian ini adalah pendidikan yang berada dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif maka pendidikan di

pesantren tidak dibahas. Di bawah ini akan dijelaskan perkembangan aktivitas Lembaga Ma'arif di kabupaten Purworejo pada periode 1952-1973 dan periode 1973-1984.

2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Purworejo Pada Periode 1952-1973 dan Periode 1973-1984

A. Periode 1952-1973

Berbicara mengenai perkembangan bidang pendidikan pada tahun 1952, tidak bisa lepas dari peranan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tanggal 28 April - 1 Mei 1952 yang telah menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya berkaitan dengan bidang pendidikan. Keputusan yang berkaitan dengan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

....3). Mendesak kepada pemerintah agar menggiatkan pendidikan Pancasila secara teratur dan bersungguh-sungguh khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang nampaknya kurang mendapat perhatian.⁴³⁾

Keputusan tersebut mengisyaratkan agar pendidikan di Indonesia secepatnya untuk dikembangkan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kegagalan memberikan pendidikan keagamaan di sekolah

43) Choirul Anam, op.cit., hlm.19.

umum dan tidak berhasilnya meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan agama, akan berakibat perikehidupan dalam masyarakat akan mengalami kepincangan. Salah satu dari bentuk nyata dari kesadaran tersebut adalah memelopori kegiatan pengembangan pendidikan di lembaga Ma'arifnya. Nahdlatul Ulama pusat kemudian memerintahkan kepada Nahdlatul Ulama Wilayah dan Cabang untuk mengembangkan Lembaga Ma'arif di daerah masing-masing.

Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo menanggapi anjuran Nahdlatul Ulama pusat secara positif. Di bawah ini penulis akan menjelaskan Lembaga Pendidikan yang berada dibawah naungan Ma'arif kabupaten Purworejo pada periode 1952-1973.

1). Pendidikan Dasar

Lembaga Pendidikan Ma'arif kabupaten Purworejo pada periode ini memiliki 3 jenis pendidikan dasar yaitu, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah dan Madrasah Wajib Belajar (MWB). Ketiga pendidikan dasar tersebut masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Agar dapat memberikan gambaran mengenai Lembaga Pendidikan Dasar ini, secara ringkas akan dijelaskan satu persatu.

a). Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah merupakan pendidikan dasar yang lama pendidikannya selama 6 tahun seperti halnya Sekolah Da-

sar (SD). Pada mulanya madrasah ini muncul atas permintaan masyarakat yang didorong oleh kehausan akan ilmu pengetahuan umum yang dilandasi oleh ilmu keagamaan. Oleh karena muncul dari keinginan masyarakat sendiri maka dukungan terhadap pendidikan jenis ini sangat besar. Suatu hal yang membanggakan berkaitan dengan pendidikan dasar ini adalah mengenai jumlahnya yang amat banyak, dimana dari semua desa yang ada di kabupaten Purworejo (494 desa) 75 % diantaranya telah memiliki Madrasah Ibtidaiyah. Disamping itu semua Madrasah ini telah memiliki tempat yang tetap (gedung dalam pengertian yang sederhana). Pendirian tempat atau gedung inipun dilaksanakan oleh masyarakat setempat tanpa bantuan dana dari pihak manapun termasuk dari organisasi Nahdlatul Ulama.

Selain mendapat dukungan dari masyarakat setempat, pendidikan jenis ini juga mendapat dukungan dari pemerintah khususnya selama melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM). Dukungan dari pemerintah ini berupa pemberian bantuan guru dan bantuan dana. Adanya bantuan dari pemerintah ini menambah lancarnya PBM sehingga mutu lulusan dari Madrasah ini bisa diandalkan. Berbeda dengan Madrasah Diniyah yang akan dijelaskan selanjutnya, Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki siswa sendiri artinya bukan siswa pinjaman dari sekolah lain, sehingga madrasah ini bisa masuk pagi.⁴⁴⁾

⁴⁴⁾ Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali mantan sekretaris Lembaga Ma'arif Jawa Tengah dan mantan ketua Lembaga Ma'arif kabupaten Purworejo periode 1957-1967. Wawancara

Selepas dari Madrasah Ibtidaiyah ini para siswa kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau ke Pendidikan Guru Agama (PGA). Para guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah ini (selain dari pemerintah) tidak mendapat bayaran sedikitpun. Semuanya dilakukan dengan sukarela serta dilandasi oleh semangat beribadah.

b). Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah ini tidak jauh berbeda dengan Madrasah Ibtidaiyah yakni menetapkan 6 tahun sebagai lama pendidikannya dan pengaturan kelasnya pun sama. Perbedaan yang utama terletak pada kandungan materi yang disampaikan. Apabila Madrasah Ibtidaiyah menerapkan 70 % pendidikan umum dan 30% pendidikan agama, maka Madrasah Diniyah menetapkan semua kandungan materinya pendidikan agama.

Beberapa pihak mengatakan bahwa dilihat dari kandungan materinya, Madrasah diniyah ini sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren. Oleh karena itu pendidikan jenis ini memiliki kewajiban dalam memenuhi tugasnya sebagai penyampai dan pewaris sekaligus sebagai pelanjut tradisi keagamaan dalam masyarakat. Nahdlatul Ulama yang sering disebut sebagai golongan tradisional sangat tepat apabila dalam lembaga pendidikannya berusaha menjaga keseimbangan antara tradisional yang sudah berkembang dalam masyarakat

...Continued...

tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

dengan perubahan sosial yang diakibatkan oleh pembangunan.

Jumlah Madrasah Diniyah di kabupaten Purworejo tidak sebanyak jumlah Madrasah Ibtidaiyah karena siswanya pun hanya merupakan siswa pinjaman dari sekolah lain yakni Sekolah Dasar. Madrasah ini masuk sore hari selepas para siswanya sekolah di sekolah umum dan memang tidak ubahnya dengan pesantren yang berfungsi menambah pengetahuan agama. Oleh karena itu setelah lulus dari madrasah ini kebanyakan mereka tetap melanjutkan ke sekolah umum (SMP) dan bukan mempergunakan ijazah dari madrasah Diniyah ini. Menurut mereka pendidikan umum digunakan untuk mencapai tujuan duniawi dan pendidikan agama berguna untuk mencapai tujuan akherati.

Dalam kaitannya dengan dukungan pemerintah, Madrasah Diniyah ini tidak mendapat bantuan guru melainkan hanya mendapat bantuan dana saja. Sebagian besar gurunya juga berasal dari pesantren atau lulusan PGA.

c). Madrasah Wajib Belajar (MWB)

Berbeda dengan 2 pendidikan dasar sebelumnya, MWB memiliki waktu pendidikan yang lebih lama yakni 7 tahun. Enam tahun pertama komposisi kurikulumnya sama dengan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah sedang satu tahun berikutnya para siswa diberi bekal ketrampilan seperti industri kecil, pertukangan, perbengkelan sederhana, menjahit dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari pemberian bekal ketrampilan ini adalah untuk membekali para siswa setelah lulus dari MWB agar nantinya bisa

bekerja dan mencari nafkah dalam masyarakat tanpa menggantungkan diri lagi kepada orang tua. Pemberian bekal ketrampilan ini sangat berguna bagi mereka yang tidak melanjutkan sekolah.

Ide dan gagasan untuk mendirikan MWB ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Bentuk dari perhatian tersebut adalah pemberian bantuan guru khusus yang telah dididik di Pacet Bandung. Dalam kaitannya dengan pendidikan, faktor guru memegang peranan yang sangat penting sebagai motivator maupun sebagai fasilitator. Selain pemberian bantuan guru, bantuan danapun mengalir dari pemerintah untuk jenis pendidikan ini. Hal ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap jenis pendidikan model ini karena pendidikan MWB ini masih sangat jarang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan.

Akan tetapi mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk mendirikan MWB ini, maka belum semua kecamatan di kabupaten Purworejo memilikinya. Dari 16 kecamatan yang ada belum 10 kecamatan yang memiliki MWB ini. Beberapa kecamatan yang telah memiliki MWB adalah kecamatan Kutoarjo (Suren), kecamatan Purworejo (Cangkreng), dan kecamatan Bener (Bandungan). Sedikitnya MWB di kabupaten Purworejo dan tingginya mutu lulusan MWB ini maka seringkali terjadi rebutan antara sekolah sekolah lanjutan baik madrasah maupun sekolah umum.

2).Pendidikan Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP)

Pendidikan tingkat lanjutan pertama yang dimiliki Lembaga Pendidikan Ma'arif kabupaten Purworejo ada 3 jenis yaitu Pendidikan Guru Agama (PGA), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya secara ringkas akan dijelaskan pendidikan jenis ini.

a). Pendidikan Guru Agama

Pendidikan Guru Agama merupakan lembaga pendidikan tingkat pertama milik Lembaga Pendidikan Ma'arif yang terbanyak. Apabila Madrasah Ibtidaiyah berhasil didirikan di hampir semua desa, maka PGA ini berhasil didirikan di semua kecamatan yang ada di kabupaten Purworejo. Lembaga pendidikan jenis ini sengaja didirikan banyak sebab lulusannya diharapkan mampu menjadi mubaligh atau guru agama yang mau mengajar di desa-desa. Kader-kader hasil didikan PGA ini nantinya akan mampu membenahi keadaan masyarakat yang dirasa kurang baik sebab mereka bisa menjadi guru atau mubaligh yang menjadi panutan masyarakat desa. Beberapa desa di kabupaten Purworejo, masyarakatnya terkadang lebih mendengarkan dan mengikuti saran dan pendapat para kyai atau mubaligh dibanding perangkat desa.

Disamping itu, pada umumnya masyarakat kabupaten Purworejo memiliki tingkat pengetahuan agama yang masih relatif rendah. Oleh karena itu diharapkan para siswa PGA selepas dari PGA ini mau mengajar di desa-desa demi peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat. Memang dari sekian banyak lu-

lusan PGA tidak semuanya menjadi guru agama maupun mubaligh, namun demikian pengetahuan agama yang diperoleh dari PGA bisa menjadi bekal hidupnya.

Dalam kurikulumnya PGA menetapkan 50 % pengetahuan agama dan 50 % pengetahuan umum. Pemberian bekal pengetahuan agama dan pengetahuan umum ini menjadikan mereka tidak picik pengetahuan apabila mengajar nanti. Hal ini akan berakibat mereka mau menerima pembaharuan di segala bidang sejauh tidak bertentangan dengan agama Islam.

b). Madrasah Tsanawiyah

Lembaga pendidikan tingkat pertama yang berbentuk madrasah ini sistem penjenjanganannya tidak berbeda dengan sekolah umum yakni 3 tahun. Komposisi kurikulumnya pun masih sama dengan Madrasah Ibtidaiyah yakni 70 % pendidikan umum dan 30 % pendidikan agama. Persamaan komposisi kurikulum ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh sebab pada dasarnya Madrasah Ibtidaiyah memang disiapkan untuk masuk dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah.

Adapun jumlah madrasah ini cukup banyak, namun apabila dibandingkan dengan PGA, jumlahnya memang lebih sedikit. Sebagian siswa yang telah lulus dari pendidikan ini kemudian melanjutkan ke Madrasah yang lebih tinggi yaitu Madrasah Aliyah.

c). Sekolah Menengah Pertama

Apabila mengikuti penggolongan Muchtar Buchori di atas, sekolah ini termasuk dalam jenis pendidikan umum yang bernafaskan Islam. Sekolah Menengah Pertama milik Lembaga Ma'arif kabupaten Purworejo jumlahnya relatif sedikit pada periode ini. Jenis pendidikan ini tidak akan dijelaskan secara panjang lebar sebab pada dasarnya pendidikan ini tidak ubahnya dengan model sekolah Menengah Pertama milik pemerintah.

3). Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Satu-satunya Lembaga Pendidikan Ma'arif untuk tingkat ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Lembaga Ma'arif memang tidak memiliki lembaga pendidikan lain untuk tingkat ini dan di kabupaten Purworejo pun untuk lembaga pendidikan tingkat ini belum banyak. Jumlah SMA yang ada di kabupaten Purworejo pada periode tersebut hanya ada 3 buah yaitu SMA Negeri, SMA Marhaen dan SMA NU. Oleh karena itu walaupun Lembaga Pendidikan Ma'arif hanya memiliki 1 buah SMA, lembaga pendidikan ini bisa dikatakan cukup maju.

Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan ini, penulis tidak akan menguraikan secara panjang sebab seperti SMP diatas, SMA ini pun tidak ubahnya dengan SMA negeri lainnya.

4). Pendidikan Tinggi

Walaupun di tingkat pendidikan menengah atas, Lembaga Ma'arif hanya memiliki 1 buah SMA namun lembaga ini patut berbangga karena telah memiliki Lembaga Pendidikan Tinggi. Lembaga Pendidikan ini merupakan yang tertua untuk tingkat yang sederajat, bahkan sampai penelitian ini dilakukan kabupaten Purworejo hanya memiliki 2 Perguruan Tinggi yaitu IKIP Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU).

Walaupun perkembangan STITNU ini tidak terlalu cepat namun telah berhasil mencetak intelektual Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamash. Munculnya STITNU ini tentu saja semakin menambah kemajuan pendidikan di lingkungan warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Mereka telah memiliki wadah yang cocok dengan haluan agamanya dan tidak sukar lagi untuk mendidik anaknya agar berhaluan Aswaja dengan memasukkan ke STITNU ini.

Perkembangan Lembaga Ma'arif untuk periode ini sudah cukup maju. Menurut Bapak Kyai Jumali, hal tersebut tidak lepas dari peran serta para pengelola Lembaga Ma'arifnya. Semangat yang besar dari para pengelolanya terutama dalam pembinaannya menjadikan lembaga Ma'arif ini dekat dengan masyarakat penduduknya. Para pengelola ini tidak segan-segan untuk berkeliling mengunjungi madrasah ataupun sekolah untuk jarak yang cukup jauh. Terkadang hal itu dilakukan pada malam

hari. 1)

Semangat yang menggebu dari para pengelola atau pengurus Lembaga Ma'arif sebenarnya dilandasi oleh Hadist Nabi yang berbunyi:2)

"Uthlubul Ilma Mahdi Ilal lahdi" (tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahad).

Dari Hadist ini memberi isyarat bahwa tidak ada berakhirnya suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan. Lebih lanjut Bapak Kyai Jumali mengatakak bahwa tujuan utama dari pendidikan bukan hanya memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu pengetahuan tetapi yang lebih penting adalah mendidik budi pekerti dan mengisi jiwa dengan aklak yang baik.47)

Tahap pertama pendidikan bagi anak didik adalah memberikan penanaman iman yang diharapkan dapat menjiwai segenap tingkah lakunya. Sesudah diberikan pendidikan keimanan barulah diberikan pendidikan ketrampilan dan pengetahuan umum lainnya. Itulah sebabnya Lembaga Pendidikan Ma'arif lebih banyak mendirikan PGA daripada sekolah umum lainnya seperti SMP dan juga didirikannya Madrasah Dinniyah yang khusus memberikan pendidikan agama.

1) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1993 di Purworejo.

2) Wawancara dengan bapak Muhtarom BA pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

47) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

Meskipun dikatakan bahwa perkembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif pada periode ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun sebenarnya tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Adapun rintangan yang dirasakan oleh Lembaga Ma'arif bisa dibagi menjadi 2 macam yakni ; hambatan intern dan hambatan ekstern. Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari dalam artinya berasal dari lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama sendiri. Sedangkan hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari luar dan hal ini erat kaitannya dengan peristiwa G 30 S/PKI.

Hambatan intern ini berasal dari beberapa warga enggan memasukkan anaknya di Madrasah Diniyah, sebab mereka beranggapan bahwa sekolah yang dobel (di dua tempat) akan menyebabkan anak menjadi bodoh. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu masalah apabila hanya dipakai dan dipahami diri sendiri, namun beberapa diantaranya berusaha mempengaruhi tetangganya untuk ikut tidak memasukkan anaknya di Madrasah Diniyah ini. Sedangkan hambatan ekstern yang berkaitan dengan masalah G30 S/PKI dapat diterangkan sebagai berikut ;
Sampai tahun 1965 situasi politik di Indonesia masih belum menentu yang kemudian diikuti oleh bidang yang lain termasuk bidang pendidikan. Keadaan politik yang kacau dimana saling terjadi perebutan pengaruh dalam masyarakat sehingga kemudian mengakibatkan suasana menjadi tidak tenang. PKI menjadikan guru-guru madrasah ataupun sekolah umum sebagai sasaran politiknya. Para guru ini diadu domba sehingga mereka ini saling bermusuhan. Keadaan yang demikian menjadikan suasana Belajar mengajar di lingkungan Lembaga Ma'arif menjadi terganggu

gu. 1)

Dalam rangka mengatasi 2 hambatan tersebut di atas Lembaga Pendidikan Ma'arif menerapkan beberapa usaha antara lain; a). Memberikan penerangan kepada warga akan pentingnya pendidikan keagamaan dan menyatakan bahwa sekolah rangkap bukannya menjadikan anak bodoh tetapi justru sebaliknya. Tindakan ini dilakukan untuk mengatasi hambatan intern yang ditimbulkan dari kalangan sendiri. b). Bersama dengan PNI meminta bantuan dari pamong desa atau perangkat desa untuk mengawasi atau mencegah tindakan PKI dalam mempengaruhi para guru. Untuk mengatasi hambatan ekstern ini, Lembaga Pendidikan Ma'arif tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain termasuk PNI dan perangkat desa. Seringkali pula diadakan pertemuan diantara para guru yang berada di lingkungan Lembaga Ma'arif demi penyelarasan tindakan dalam menghadapi PKI.

Dunia pendidikan di lingkungan Lembaga Ma'arif setelah G 30 S/PKI meletus berkembang semakin pesat, apalagi setelah pemerintah Orde Baru lahir dan pemerintah Orde Lama berakhir. Memang pemerintah telah menetapkan program pembangunan ekonomi sebagai program yang didahulukan, namun dalam segala kemajuan lahir yang di akibatkan oleh perkembangan ekonomi akan membawa implikasi yang antara lain terjadinya perubahan tata nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu sejajar dengan pem-

1) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

bagunan lahiriah yang kokoh perlu sekali adanya pengimbangan jiwa yang kokoh pula. Pembangunan jiwa yang kokoh dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Semangat untuk membangun jiwa yang kokoh dalam lingkungan Lembaga Ma'arif sangat besar terbukti dengan kemauan para guru yang tanpa dibayar mau mengajar.

Sampai dengan awal tahun 70-an perkembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif masih lancar-lancar saja.⁴⁹⁾ Namun setelah tahun 1971 keadaan yang demikian menjadi berubah. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1971 telah memunculkan satu kekuatan besar yakni Golongan Karya (Golkar) serta menempatkan Nahdlatul Ulama sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Golkar ini. Kondisi baru yang tercipta setelah Pemilu 1971 tersebut ikut merubah suasana pendidikan di lingkungan Lembaga Ma'arif. Bisa dimengerti karena Lembaga Ma'arif adalah suatu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang sekaligus sebagai pesaing utama partai pemerintah (Golkar). Lembaga Ma'arif kemudian merasakan adanya hambatan-hambatan yang sengaja dimunculkan oleh pihak tertentu. Disamping itu kemudian muncul ketakutan diantara para pengurus Lembaga Ma'arif akan munculnya Undang-Undang yang membatasi atau menutup Lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan suatu Partai Politik

49) Wawancara dengan Bapak Drs Khanifan, Ketua Lembaga Ma'arif Cabang Purworejo periode 1989-1993 dan periode 1994-1999. Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1994.

tertentu.⁵⁰⁾

Untuk mengantisipasi keadaan yang semacam ini maka Lembaga Pendidikan Ma'arif kemudian melaksanakan suatu kebijaksanaan dengan menyerahkan kewenangan kepengurusan bidang pendidikan kepada Yayasan Imampuro. Pada prinsipnya Yayasan Imampuro adalah suatu yayasan yang tidak ada kaitannya dengan Lembaga Ma'arif, namun demi menyelamatkan bidang pendidikan di lingkungan Lembaga Ma'arif, lembaga tersebut diberi wewenang untuk mengurusinya. Mengenai perkembangan pendidikan setelah berada dibawah Yayasan Imampuro ini akan di jelaskan pada bagian di bawah ini secara ringkas. Penjelasan yang secara ringkas ini hanya dimaksudkan untuk melihat perkembangan lembaga pendidikan yang semula berada di bawah naungan Lembaga Ma'arif dan beralih di bawah naungan Yayasan Imampuro. Oleh karena pada dasarnya Yayasan Imampuro berbeda dengan Lembaga Ma'arif, sedangkan fokus pembicaraan dalam penelitian ini adalah Lemabaga Ma'arif maka pembahasannya tidak secara panjang lebar.

b). Periode 1973-1984

Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai kepartaian maka sejak tahun 1973 Nahdlatul Ulama telah berfusi dalam Partai Persatuan Pembagunan (PPP) bersama Permusi, PSII

⁵⁰⁾ Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 17 April 1994 di Purworejo.

dan Perti. Lembaga Ma'arif yang telah melaksanakan niatnya untuk menyelamatkan lembaga pendidikannya tetap menyerahkan kekuasaan kepada Yayasan Imampuro walaupun Nahdlatul Ulama sekarang bukan lagi sebagai partai politik yang berdiri sendiri. Drs Mujahid mantan sekretaris Yayasan Imampuro menjelaskan, selain karena ketakutan akan kemungkinan munculnya Undang Undang yang akan menutup lembaga pendidikan di bawah naungan suatu partai politik tertentu, pemberian wewenang kepada Yayasan Imampuro inipun disebabkan karena menteri Agama RI berasal dari Muhammadiyah yang menjadikan gerak langkah bidang pendidikan dibawah Nahdlatul Ulama menjadi lebih sempit.⁵¹⁾ Oleh karena itu diharapkan dengan berada di bawah naungan Yayasan Imampuro gerak langkah lembaga pendidikan ini bisa lebih luas lagi.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali hubungan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama menjadi tegang hanya gara-gara masalah kursi kepemimpinan. Alasan yang dimunculkan adalah apabila kursi kepemimpinan berada di tangan orang Nahdlatul Ulama maka kepentingan organisasi Nahdaltu Ulama lebih diutamakan daripada organisasi yang lain, dan begitu pula sebaliknya.

Alasan yang digunakan untuk mendukung ketakutan akan munculnya Undang Undang pembatasan atau penutupan lembaga

51) Wawancara dengan Bapak Drs Mujahid mantan sekretaris Yayasan Imampuro pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

pendidikan di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, adalah sering terjadinya ketegangan atau persaingan antara pemerintah dengan organisasi ini. Salah satu contoh ketegangan yang terjadi antara pemerintah dengan Nahdlatul Ulama adalah masalah UU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada tahun 1973. Undang-Undang ini sepenuhnya ditolak oleh PPP karena semua pasal yang termuat didalamnya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun yang menolak kelihatannya PPP namun apabila diamati, yang menjadi tokohnya adalah orang-orang Nahdlatul Ulama seperti Jusuf Hasyim, Achmad Sjaichu, Kyai Maskur dan Bisri Syamsuri. 52)

Perkembangan pendidikan selama dibawah Yayasan Imampuro menurut beberapa tokoh mengalami kemunduran. Adapun penyebab kemunduran tersebut menurut Bapak Kyai Jumali adalah :

- a). Kurangnya hubungan antara organisasi dengan wali murid.
- b). Tanpa adanya bimbingan dari organisasi pada madrasah dan sekolah.
- c). Kurangnya kemampuan dan jiwa perjuangan dari para pengurus. 53)

Apabila dilihat dari jumlah lembaga pendidikannya memang telah jauh berkurang dari periode sebelumnya. Apabila pada periode 1952-1973, Pendidikan Guru Agama mewarnai semua

52) Umaidi Radi, Strategi PPP 1973-1982, (Jakarta: Integritas Press, 1984), hlm.91-93.

53) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo

kecamatan di kabupaten Purworejo maka pada periode ini tidak satupun yang tersisa. Lembaga pendidikan lain seperti madrasah juga mengalami pengurangan . Dari beberapa Madrasah Tsanawiyah yang telah ada pada periode 1952-1973, pada periode ini sebagian ada yang telah bubar dan ada pula yang beralih ke Negeri dan bahkan ada yang beralih ke Muhammadiyah. Sampai batas periodisasi penelitian ini berakhir, lembaga pendidikan ini belum bisa dikatakan berkembang pesat seperti pada periode 1952-1973.

3. Perbandingan Perkembangan Lembaga Pendidikan Antara Periode 1952-1973 dengan Periode 1973-1984

Perjalanan Lembaga Pendidikan Ma'arif selama 2 periode seperti tersebut di atas terasa cukup unik. Perjuangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Lembaga Ma'arif-cukup berat, terutama dalam periode 1952-1973. Perbenturan kepentingan dengan PKI pada periode tersebut seringkali membuat Lembaga Pendidikan Ma'arif harus berkorban dan menjadikan kegiatan didalamnya terhambat. Disamping itu pada periode 1952-1973 perekonomian rakyat masih sangat rendah sehingga untuk membangkitkan semangat memperoleh pendidikan lebih berat dibandingkan jika perekonomian rakyat sudah mapan. Namun berkat usaha yang gigih Lembaga Pendidikan Ma'arif mampu membangkitkan semangat warga dengan terbukti munculnya Madrasah

Ibtidaiyah hampir di semua desa. Perjuangan Lembaga Ma'arif ini dilandasi pula oleh Hadist Nabi yang berbunyi :
"Didiklah anak-anak kalian, karena mereka sesungguhnya adalah insaan-insaan yang bakal hidup bukan pada zaman kalian".⁵⁴⁾

Tanpa membuat analisis yang lebih dalampun, sebenarnya setelah membaca tulisan bidang pendidikan pada bagian atas sudah dapat diketahui bahwa pada periode 1952-1973 aktivitas Lembaga Pendidikan Ma'arif kabupaten Purworejo lebih berkembang dibanding periode 1973-1984. Dengan berhasilnya mengatasi banyak kendala yang dihadapi pada periode 1952-1973 terutama di sekitar tahun 1965 sudah sangat menunjukkan keberhasilan Lembaga Pendidikan tersebut. Sementara beralihnya kekuasaan dari Lembaga Ma'arif ke Yayasan Imampuro pada awal periode 1973-1984 membuktikan bahwa pada periode ini secara resmi Lembaga Ma'arif tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Disamping itu pada periode ini jumlah sekolah atau madrasah yang telah dibangun pada periode 1952-1973 menjadi berkurang.

Mengikuti pendapat Subarkah Hasyim yang memberikan penilaian bahwa periode ini masalah pendidikan dilingkungan Nahdlatul Ulama benar-benar mengalami kemunduran,⁵⁵⁾

⁵⁴⁾Saifullah MS, "Menyemai Tunas-Tunas Yang Sehat Sejak Dini", dalam Warta NU no.2 / Th.4 / April 1988 / Sya'ban 1408 H.

^{55.} Wawancara dengan Bapak R Subarkah Hasyim, Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada periode 1994-1999. Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1994.

C. BIDANG SOSIAL

1. Masalah Sosial Umat Islam dan Kewajiban Organisasi Nahdlatul Ulama

Sejalan dengan perubahan tata pemerintahan di Indonesia, dari pemerintahan penjajah (kolonial) ke tata pemerintahan sendiri dan dari tata pemerintahan Orde Lama ke tata pemerintahan Orde Baru, telah terjadi pula perubahan di bidang sosial. Perubahan tata pemerintahan baru tersebut sudah barang tentu disertai pula dengan munculnya kebijaksanaan baru yang menurut pemegang kekuasaan dirasa lebih baik. Kebijaksanaan baru yang dimunculkan oleh penguasa baru seringkali membawa dampak baik positif maupun dampak yang negatif. Dampak tersebut sebagian besar menyangkut kehidupan umat Islam sebab dari sekian banyak penduduk Indonesia sebagian besar diantaranya beragama Islam.

Masalah sosial yang tetap mengikuti umat Islam dari masa ke masa adalah perihal pemenuhan 6 kebutuhan pokok yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Memang sebenarnya hal ini bukan saja dialami oleh umat Islam saja, akan tetapi mengingat jumlah umat Islam yang sedemikian besar maka jumlah yang mengalami masalah sosial tersebut sebagian besar adalah umat Islam. Sementara apabila diperkecil lagi, umat Islam yang mengalami masalah tersebut adalah umat Islam warga Nahdlatul Ulama yang tinggal di pedesaan. Sampai sejauh mana kenyataan ini benar, dapat dilihat dari kehidupan umat

Islam yang berada di pedesaan yang menempati bidang pertanian dan bidang tersebut relatif kecil.

Kadaan umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama di atas menyita perhatian organisasi Nahdlatul Ulama dan menuntutnya untuk melakukan suatu tindakan guna mengatasinya. Pemenuhan 6 kebutuhan pokok mutlak dipenuhi oleh warga Nahdlatul Ulama demi kelangsungan hidupnya. Disamping itu tidak terpenuhinya salah satu dari enam kebutuhan pokok tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Menurut salah satu Hadist Nabi bahwa kefakiran lebih mendekatkan diri seseorang kengan kekafiran .

Mengingat jumlah warga Nahdlatul Ulama yang sedemikian banyak, maka tidaklah mudah bagi organisasi Nahdlatul Ulama untuk memenuhi kewajibannya mengentaskan warga dari kesulitan tersebut. Salah satu usaha yang tidak memerlukan banyak biaya adalah melakukan pendekatan esoteris, yaitu upaya pemberian ketenangan batin, penentraman hati dan kepasrahan kepada Allah.⁵⁶⁾ Usaha ini bisa dilakukan melalui sarasehan, pengajian dan penyuluhan baik untuk kelompok kecil maupun untuk kelompok besar. Dalam kesempatan seperti itu perlu disampaikan firman Allah dala surat Al Baqarah ayat 155 yang

56) Koentowidjoyo, "Da'wah Islam dalam Perspektif Historis", dalam Amrullah Achmad (editor), Da'wah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), hlm.79.



berbunyi :

"Sesungguhnya kami, Allah akan selalu mencobamu sekalian dengan rasa kuatir, kelaparan, kemiskinan, banyak kematian dan kekurangan buah kurma. Namun demikian bergembiralah orang yang selalu tahan uji".⁵⁷⁾

Berkaitan dengan bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan 6 kebutuhan pokok, organisasi Nahdlatul Ulama senantiasa secara selektif menanganinya. Selektif disini bukan berarti membeda bedakan, melainkan perihal bentuk bantuannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat 2 golongan orang miskin yakni; pertama, miskin karena tidak mampu bekerja yang disebabkan cacat, sakit, ataupun ketuaan, kedua miskin karena pekerjaan yang dilakukan hanya menghasilkan pendapatan yang sangat rendah. Adapun bantuan yang diberikan kepada mereka yang sudah tidak mampu bekerja adalah berupa pakaian, makanan, perumahan, yang pada prinsipnya dapat langsung dimanfaatkan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, bentuk bantuannya berupa modal atau pemberian pekerjaan baru, sehingga mereka bisa meningkatkan penghasilannya. Diharapkan dengan cara ini terwujudnya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan umat manusia, sehingga terwujud masyarakat yang adil makmur yang diridloi Allah.

⁵⁷⁾Zaenuddin Hamidy dan Fachruddin, *op.cit*, hlm. 469.

2. Kegiatan Sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo Periode 1952-1973 dan Periode 1973-1984.

Lembaga sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada 2 periode ini secara resmi memang belum terbentuk seperti halnya Lembaga Da'wah dan Lembaga Ma'arif. Namun demikian aktivitas atau kegiatan sosial telah dilaksanakan sejak lama bahkan sejak awal Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo didirikan pada tahun 1939. Kegiatan sosial di lingkungan Nahdlatul Ulama khususnya di kabupaten Purworejo didasari oleh anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pusat yang tertuang dalam pasal 3 yang berbunyi :

"Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ihtiar :

... (e). Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan madjid-masdjid, langgar-langgar dan pondok-pondok, begitoe joega hal ichwal anak-anak, jatim dan orang-orang jang fakir miskin .⁵⁸⁾

Anggaran Dasar yang menyangkut pemberian bantuan seperti tersebut di atas sebenarnya dilakukan dalam rangka memutus lingkaran setan yang di dalamnya mencakup kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Lingkaran setan tersebut dimulai dari kemiskinan yang menyebabkan kebodohan dan

⁵⁸⁾ Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 6 Pebruari 1936. Anggaran dasar selengkapnya dalam buku Choi-rul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, (Sala: Jatayu, 1985), pada lampiran III.

kebodohan menjadikan keterbelakangan. Oleh karena itu untuk memutus lingkaran setan masalah yang pertama dituntaskan adalah masalah kemiskinan. Agama Islam sebenarnya memiliki konsep yang ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan ini yang salah satunya adalah zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat hukumnya fardlu ain. Selain menunjukkan ketaatan kepada Allah, pengamalan zakat menunjukkan kecintaan kepada umat manusia.

Dalam pelaksanaannya, ada 2 sisi yang perlu diperhatikan dalam zakat. Pertama, mengenai kewajiban zakat dengan landasan yang telah ada dalam Al Qur'an. Kedua, mengenai sisi penerimaannya termasuk di dalamnya tata cara penerimaan dan penerimanya.⁵⁹⁾ Pada dasarnya zakat bisa dibagi menjadi 2 yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Menurut kitab kuning atau klasik, yang termasuk kedalam zakat maal adalah emas, perak, binatang, dan makanan pokok. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dibayar oleh semua umat Islam yang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam bentuk makanan pokok sebanyak 2,5 kg.

Berkaitan dengan penerimanya, zakat diharapkan bisa berfungsi sebagai kail bukan sebagai ikan atau dengan kata lain zakat harus memiliki fungsi produktif. Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo dalam kaitannya dengan hal ini telah

⁵⁹⁾ Kyai Ali Yafie, "Menggalakkan Zakat Mengatasi Kemiskinan", dalam Warta NU No.9 /Th.1 Mei 1986 / Ramadhan 1406 H.

berusaha melaksanakannya pada periode 1952-1973 dengan menyerahkan pelaksanaannya kepada organisasi tingkat ranting (organisasi Nahdlatul Ulama tingkat desa). Adapun hal ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan zakat maal atau zakat fitrah di organisasi ranting yang kemudian organisasi tersebut mengkoordinir penyerahannya. Sasaran pemberian zakat ini adalah para warga yang berekonomi lemah yang difokuskan pada pedagang kecil. Modal tersebut diharapkan mampu sebagai tambahan dagangannya. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pedagang tersebut diwajibkan menyerahkan kembali modal kepada organisasi yang kemudian meneruskannya kepada pedagang lain yang belum pernah menerimanya. Usaha tersebut dilaksanakan demi pengentasan kemiskinan seperti yang telah disebutkan di atas. 60)

Pada awal periode 1952-1973 pelaksanaan kegiatan tersebut di atas berjalan lancar - lancar saja dan baru mendapat hambatan ketika PKI mulai berulah. Salah satu tingkah PKI yang menyebabkan masalah sosial di kabupaten Purworejo adalah propaganda yang dilancarkannya sehingga warga pedesaan kemudian berduyun-duyun pergi ke kota. Dalam propagandanya dikatakan bahwa para penduduk yang mau pergi ke kota akan memperoleh pekerjaan dengan imbalan gaji yang besar. Oleh karena keadaan desa yang dirasa tidak menguntungkan serta propaganda PKI tersebut, maka kemudian banyak penduduk yang

60) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

berurbanisasi ke kota. Namun yang ditemui adalah keadaan yang lebih buruk daripada di desa tempat asalnya. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi PKI menawarkan jasa baiknya dengan ditambah janji yang menggiurkan dan disertai syarat untuk mendukung program PKI.

Secara tidak sadar mereka ini kemudian menjadi antek-antek PKI yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan apa-apa kecuali janji. Di lain pihak keluarga yang ditinggalkan di desa menjadi semakin mengalami kesulitan sebab harapan untuk memperbaiki kehidupannya tidak pernah tercapai lagi. Padahal suami atau anak laki-laki yang pergi ke kota tersebut, merupakan tulang punggung perekonomian keluarga. Kekurangan bahan makanan dan pakaian menjadi akrab dengan penduduk pedesaan di wilayah kabupaten Purworejo. Rakyat menjadi semakin menderita ketika PKI mulai melancarkan teror-terornya, sehingga terlengkaplah penderitaan mereka yakni penderitaan lahir dan penderitaan batin.

Keadaan yang demikian memang di sengaja oleh PKI, sebab di ketahui bahwa sebagian besar penduduk pedesaan adalah warga Nahdlatul Ulama yang menjadi lawan politik PKI. Nahdlatul Ulama sendiri memang memandang PKI sebagai musuh utamanya dengan dengan didasari 2 motivasi. Dua motivasi yang dimaksud adalah motivasi politik dan motivasi keagamaan. Namun motivasi yang disebut terakhir rupanya lebih dominan dibanding motivasi politiknya, sebab PKI sendiri juga memandang Nahdlatul Ulama bukan saja lawan politik melainkan juga lawan ideologi

yang harus dihabisi. Warga pedesaan yang memang merupakan warga Nahdlatul Ulama menjadi sasaran rencana PKI tersebut.

Organisasi Nahdlatul Ulama sadar bahwa penyebab utama para warga menjadi pendukung PKI bukanlah tercetus dari hati nuraninya melainkan karena keadaan yang membuatnya demikian. Lingkaran setan seperti tersebut di ataslah yang telah membelenggu warga Nahdlatul Ulama sehingga sebagian dari mereka menjadi pengikut partai yang menyekutukan Tuhan. Mengingat penyebab utamanya adalah kemiskinan, maka satu-satunya usaha untuk menjauhkan warga dari pengaruh PKI adalah mengentaskannya dari kemiskinannya. Adapun caranya adalah pemberian bantuan kepada warga baik berupa makanan, pakaian ataupun bantuan lain yang bisa menjauhkan rakyat dari pengaruh PKI. Kegiatan tersebut tidaklah mudah dilakukan mengingat PKI sendiri juga menghalangi usaha ini, namun berkat usaha yang dilandasi niat yang baik akhirnya usaha ini tidaklah sia-sia.

Keadaan semakin berubah setelah meletus pemberontakan PKI yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1965. Warga masyarakat mulai terbuka matanya kembali melihat kekejaman yang dilakukan PKI dan mulai mengerti tujuan sebenarnya yang diinginkan PKI. Mereka sadar bahwa dalam waktu yang cukup lama mereka telah terbius oleh tipu daya PKI dan bersedia melakukan apa saja yang diinginkan PKI tanpa melihat baik atau tidak. Sebagai balasan yang ditimpakan kepada PKI, warga Nahdlatul Ulama dengan semangat yang menggebu-gebu membantai PKI beserta antek-anteknya.

Usaha penumpasan PKI di kabupaten Purworejo dimotori oleh ABRI dan organisasi Nahdlatu Ulama ini. Beberapa tokoh muda yang berasal dari Nahdlatul Ulama adalah :

1. Kundari, BA sebagai ketua KAMI Purworejo.
2. Achmad Muhadis sebagai ketua KAPPI.
3. Adi Khoirun sebagai ketua GP Ansor.
4. Muhtarom BA sebagai ketua KAP Gestapu dan Front Pancasila.⁶¹⁾

Oleh karena Nahdlatul Ulama ikut mempelopori penganyangan PKI maka pada waktu itu di setiap rumah penduduk terpasang lambang organisasi ini. Adapun tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri dari amukan masa yang sebagian besar berasal dari Nahdlatul Ulama. Menurut mereka apabila telah terpasang bendera atau lambang organisasi ini (belum tentu warga Nahdlatul Ulama) merasa sudah aman.

Aksi penganyangan PKI dikalangan warga Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo semakin menggelora setelah muncul resolusi 5 Oktober yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Resolusi ini ditandatangani oleh Rais Aam, KH Wahab Hasbullah, KH Idham Chalid dan KH Achmad Dahlan. Adapun isi dari resolusi ini adalah :⁶²⁾

61) Wawancara dengan bapak Muhtarom BA pada tanggal 25 Maret 1994 di Purworejo.

62) Saefullah MS, Sumbangsih NU, terhadap Orba, dalam warta NU No.14 / Th.V / April 1989 / Ramadhan 1409 H.

1. Menentang sikap PKI
2. Minta supaya PKI dibubarkan
3. Minta agar para pelakunya diseret ke pengadilan

Akibat dari resolusi ini memanglah sangat hebat dimana sering terjadi perkelahian antara warga Nahdlatul Ulama dengan para PKI di sawah-sawah yang muncul di mana-mana. Menurut Bapak Kyai Jumali, keluarnya resolusi tersebut memberikan kekuatan psikologis bagi warga Nahdlatul Ulama. 63)

Setelah PKI berhasil dilumpuhkan maka kegiatan masyarakat berjalan seperti sedia kala. Ketika Orde Baru lahir dan kemudian menerapkan program pembangunannya yang menetapkan sektor ekonomi sebagai prioritas utamanya menjadikan kehidupan masyarakat semakin meningkat. Berkembangnya pembangunan tersebut disertai dengan munculnya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi berarti pula masalah kemanusiaan semakin meluas sehingga penataan kegiatan sosial semestinya semakin ditingkatkan, dengan kata lain keseluruhan sistem sosial harus ditinjau kembali baik efektivitas, efisiensi maupun jangkauan penanganan masalah.

Diakui oleh tokoh Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo bahwa kegiatan sosial dilingkungannya masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Apabila Muhammadiyah kabupaten Purwoarejo telah

63) Wawancara dengan Bapak Kyai Jumali pada tanggal 31 Maret 1994 di Purworejo.

memiliki Pantai Asuhan Muhammadiyah (PAM), maka organisasi Nahdlatul Ulama ini hanya mampu mengembangkan kegiatan sosial dalam bidang yang kecil dan terbatas di tingkat desa. Setelah pemerintahan Orde Barupun kegiatan yang dilakukan belum bisa menyamai kegiatan sosial Muhammadiyah. Kegiatan sosial yang dilakukan sifatnya lebih banyak pada pembinaan kegiatan yang sebenarnya telah ada sejak lama.

Dalam tradisi pedesaan di kabupaten purworejo banyak terdapat perkumpulan- perkumpulan atau kelompok mencangkul ataupun kelompok kematian. Kelompok mencangkul ini semula dari kelompok pengajian di suatu langgar atau mushola. Sehingga dalam satu desa terdapat banyak kelompok mencangkul sesuai dengan banyaknya kelompok pengajian. Disamping mengadakan pergantian tempat kerja di masing-masing anggota, kelompok ini juga menjual tenaga atau memborong tanah untuk dicangkul. Hasil atau upah dari penjualan tenaga ini dikumpulkan dalam kelompok dan kemudian dijadikan modal kelompok. Uang tersebut biasanya dibelikan ayam atau kambing yang kemudian dipelihara oleh anggota. Keuntungan dari hasil penjualan kambing atau ayam dijadikan milik kelompok setelah dipotong upah pengelola atau pemelihara. Selain itu hasil dari kerja kelompok di atas juga dibelikan barang barang yang bisa dipergunakan oleh anggota kelompoknya seperti piring, gelas, sendok dan lain lainnya. Biasanya barang barang ini tiap kelompok berbeda-beda jenisnya sehingga mereka bisa saling bergantian dalam mempergunakannya. Bagi mereka yang bukan anggo-

ta kelompok penggunaan barang-barang ini di kenai uang penyewaan yang besarnya ditentukan oleh anggota kelompok. Hasil dari penyewaan ini dipergunakan untuk memperbesar usahanya, sehingga dalam satu desa kemudian muncul kelompok-kelompok penyewaan.

Kegiatan sosial semacam ini berkembang dengan baik ketika para pengurus Nahdlatul Ulama masih aktif mengadakan pembinaan terutama setelah Orde Baru sampai akhir tahun 1972. Upaya pembinaan kepada warga tersebut tentu saja menyita banyak waktu dan tenaga dari para pengurus. Akan tetapi berkat semangat yang tinggi usaha di bidang sosial seperti di atas bisa dilaksanakan.

Sementara bentuk bantuan kepada warga selain pembinaan (kecuali zakat) sifatnya masih spontanitas, artinya bantuan ini hanya muncul sewaktu warga membutuhkannya seperti terjadinya bencana alam. Bentuk bantuan pada warga yang terkena musibah semacam ini berbentuk makanan, pakaian, obat-obatan ataupun sejumlah uang. Oleh karena sifatnya hanya spontanitas maka kegiatan semacam ini tidak pernah dicatat termasuk di dalamnya masalah pembinaan pada kelompok seperti tersebut di atas. Semua kegiatan semacam ini sifatnya sukarela, sehingga tidak ada berusaha untuk mengabadikan dalam suatu catatan khusus.

Suatu hal yang patut diungkapkan adalah mengenai pengumpulan sumbangan dari warga apabila terjadi bencana alam. Organisasi Nahdlatul Ulama berusaha mengumpulkan dana

dari warga untuk diteruskan kepada warga lain yang sedang mengalami musibah. Bentuk sumbangan dari warga sebagian besar bukan berupa uang melainkan berupa hasil bumi seperti kelapa, padi, jagung, ketela yang pada pokoknya bukan uang. Bapak Kyai jumali menerangkan bahwa rakyat akan lebih ikhlas apabila diminta sumbangan kelapa 20 butir dari pada uang Rp 1000,00. Sementara bila diperinci harga kelapa 20 butir akan lebih besar dari pada uang Rp 1000,00.-. Keadaan seperti ini menunjukkan betapa berartinya uang bagi masyarakat pedesaan.

Beberapa kegiatan sosial yang telah berkembang dengan baik pada periode 1952-1973 tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan baik pada periode 1973-1984. Adapun kegiatan yang masih bisa dilaksanakan adalah jenis kegiatan yang dilaksanakan secara spontanitas seperti bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Sedangkan bentuk bantuan yang dilakukan seperti pembagian modal kepada pedagang kecil sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Penyebab utama dari keadaan ini adalah kesibukan dari para pengurus dalam bidang politik praktis. Sementara pembinaan yang dilakukan pada kelompok-kelompok mencangkul atau kelompok kematian pun sudah tidak dapat dilaksanakan seperti sedia kala. Namun karena hal ini sudah tumbuh dan mengakar pada masyarakat pedesaan, kegiatan ini tidak menjadi mati walaupun tanpa pembinaan dari pengurus organisasi Nahdlatul Ulama.

3. Perbandingan Aktivitas Sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo Periode 1952-1973 dengan Periode 1973-1984

Aktivitas sosial dilingkungan Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo pada periode 1952-1973 ternyata tidak berjalan dengan mulus. Ketika PKI mulai melaksanakan kegiatannya, masalah sosial yang memang sudah ada lama masyarakat makin menjadi besar. Pemenuhan 6 kebutuhan pokok yang sejak awal periode ini belum bisa terpenuhi dengan baik oleh warga Nahdlatul Ulama semakin menjadi masalah ketika PKI memperkeruh suasana. Usaha sosial dilingkungan organisasi ini seperti pengumpulan zakat yang kemudian diserahkan kepada para pedagang kecil untuk sementara terhenti.

Pemberian bantuan pada tahun 1965 ini lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan praktis seperti sandang dan pangan, bukan pada usaha pengembangan produktivitas dan pembinaan kelompok - kelompok kerja seperti tersebut di atas. Upaya yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini berhasil mengentaskan sebagian warganya baik yang sudah terjerumus atau yang belum dalam kegiatan PKI.

Kegiatan sosial Nahdlatul Ulama pada periode 1952-1973 memang kelihatan masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Untuk ukuran suatu organisasi sosial keagamaan yang tertua di Indonesia bentuk kegiatan sosial yang dilakukan ini memang terasa masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bahkan untuk semen-

tara orang di wilayah kabupaten Purworejo ada yang tidak pernah tahu aktivitas sosial organisasi ini.

Namun demikian kegiatan sosial pada periode 1952-1973 yang dianggap kecil tersebut, masih lebih besar dibandingkan kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi ini pada periode 1973-1984. Tidak berarti mengecilkan aktivitas sosial yang dilakukan oleh organisasi ini pada periode 1973-1984, namun kenyataannya memang demikian. Diakui oleh sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo seperti Muhtarom BA dan Kyai Jumali bahwa untuk kegiatan semacam ini pada periode 1973-1984 sekan-akan mengalami masa kevakuman. Untuk menyebut kegiatan sosial tidak ada sama sekali juga tidak mungkin sebab bentuk bantuan yang spontanitas tetap dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah perkembangan aktivitas sosial Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo sejak tahun 1952- 1984, yang pada prinsipnya lebih mengalami perkembangan pada periode 1952-1973 dibanding periode 1973-1984. Tentang perkembangan tingkat kehidupan rakyat dan pemenuhan 6 kebutuhan pokok yang lebih pada periode 1973-1984, lebih erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tema skripsi di atas, maka pada bagian terakhir ini penulis akan menarik suatu kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Pertama.

Perkembangan bidang da'wah di lingkungan Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo pada periode 1952-1984 yang dibedakan antara tahun 1952-1973 dan tahun 1973-1984, ternyata mengalami pasang surut. Berkaitan dengan komponen da'wah yang meliputi pelaku, metode, sasaran, media, lokasi dan materi, secara garis besar tahun 1952-1973 lebih mengalami perkembangan dibandingkan dengan tahun 1973-1984. Adapun komponen da'wah yang dikatakan mengalami perkembangan adalah pelaku da'wah, metode da'wah, lokasi da'wah dan sasaran da'wah. Sementara yang lebih menonjol perkembangannya pada tahun 1973-1984 adalah media da'wah, sedangkan mengenai materi da'wah dalam 2 kurun waktu tersebut tidak dapat diperbandingkan.

Kedua

Dalam bidang pendidikan, perkembangan yang dialami

oleh Nahdlatul Ulama kabupaten Purworejo dalam periode 1952-1984 juga tidak jauh berbeda dengan bidang da'wah. Artinya, dalam tahun 1952-1973 lebih banyak mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 1973-1984. Perbedaan perkembangan dalam bidang pendidikan dalam dua kurun waktu ini nampak sangat menyolok. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah atau madrasah yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif milik Nahdlatul Ulama ini pada kurun waktu 1952-1973 yang amat banyak. Sementara pada kurun waktu 1973-1984, Nahdlatul Ulama secara resmi tidak lagi memiliki sekolah atau madrasah yang dikelola sendiri oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, karena pengelolaan dan tanggung jawabnya telah diserahkan kepada Yayasan Imampuro.

Ketiga

Berkaitan dengan bidang sosial yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama pada periode 1952-1984, ternyata merupakan bidang yang paling tidak menyolok mengalami perubahan perkembangan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas dibidang ini sejak awal sampai akhir periode 1952-1984 hanya bersifat sederhana dan terbatas di tingkat desa. Sedangkan aktivitas pada tingkat kecamatan dan kabupaten yang dikelola secara profesional belum pernah ada. Oleh karena itu ketika bidang lain mengalami penurunan maka dalam bidang ini tidak mengalami perubahan yang menyolok.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid

NU dan Islam Dewasa Ini", dalam Prisma 4 April 1984

Ali Yafie

"Menggalkan Zakat Mengatasi Kemiskinan", dalam Warta NU No.9/Th. I Mei 1986 / Ramadhan 1406 H.

Ali Mukti, A.

1971 Faktor-Faktor Penjiaran Islam
Jogjakarta: Jajasan Nida

Amrullah Achmad

1983 "Da'wah Islam dan Perubahan Sosial: Suatu Kerangka Pendekatan dan Permasalahan", dalam Amrullah Achmad (ed), Da'wah Islam dan Perubahan Sosial
Yogyakarta: Prima Duta

Ace Partadiredja

1983 "Da'wah Islam Melalui Kebutuhan Pokok Manusia", dalam Amrullah Achmad (ed), Da'wah Islam dan Perubahan Sosial
Yogyakarta: Prima Duta

Choirul Anam

1985 Perubahan dan Perkembangan NU
Sala: Jatayu

Einar Martahan Sitompul

1989 NU dan Pancasila
Jakarta : Sinar Harapan

Farouq Abu Zaid

1986 Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis
Jakarta : P3M

Ismail Yacub, TK.

1983 "Da'wah Islam dan Kepastian Hukum", dalam Amrullah Achmad (ed), Da'wah Islam dan Perubahan Sosial
Yogyakarta : Prima Duta

Koentowidjojo

1983 "Da'wah Islam dalam Perspektif Historis", dalam Amrullah Achmad (ed), Da'wah Islam dan Perubahan Sosial
Yogyakarta : Prima Duta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mochtar Bochori

1989 "Pendidikan Islam di Indonesia: Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan", dalam Muntaha Ashari dan Abdul Mun'kim Saleh (penyunting), Islam di Indonesia Menatap Masa Depan
Jakarta : P3M

Muhammad Hatta

1959 Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan
Jakarta : PT Pembangunan

Muslih Usa

1991 "Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta Suatu Pengantar", dalam Muslih Usia (ed), Pendidikan Islam Antara Cita dan Fakta
Yogyakarta : PT Tiara Wacana

Rozy Munir, H.

1993 "NU dan Reorientasi Wawasan Ekonomi", dalam Yunahar Ilyas dkk (ed), Muhamadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman
Yogyakarta : Kerjasama LPPI UMY, LKPSM NU dan PP Al-Muhsin

Saefullah MS

"Menyemai Tunas-Tunas Yang Sehat Sejak Dini", dalam Warta NU No.2 / Th IV / April 1988 / Sya'ban 1408 H

"Sumbangsih NU terhadap Orba", dalam Warta NU NO.14 / Th.V / April 1989 / Ramadhan 1409 H

SLamet Effendi Yusuf

1989 "Jejak", dalam NU 1984-1989 (kliping berita dan tulisan)
Jakarta : Lajnah Ta'lif Nasyir (LTN), bekerjasama dengan Lajnah Kajian dan Sumber daya Manusia (Lekspeadam)

Syamsuddin Haris

1990 "NU dan Politik: Perjalanan Mencari Identitas", dalam Jurnal Politik 7
Jakarta : Gramedia Pustaka

Umaidi Radi

1984 Strategi PPP 1973-1982
Jakarta: Integritas Pres

Winarno Surachmad

1970 Dasar dan Teknik Research : Suatu Pengantar Metodologi Ilmiah
Bandung : Tarsito

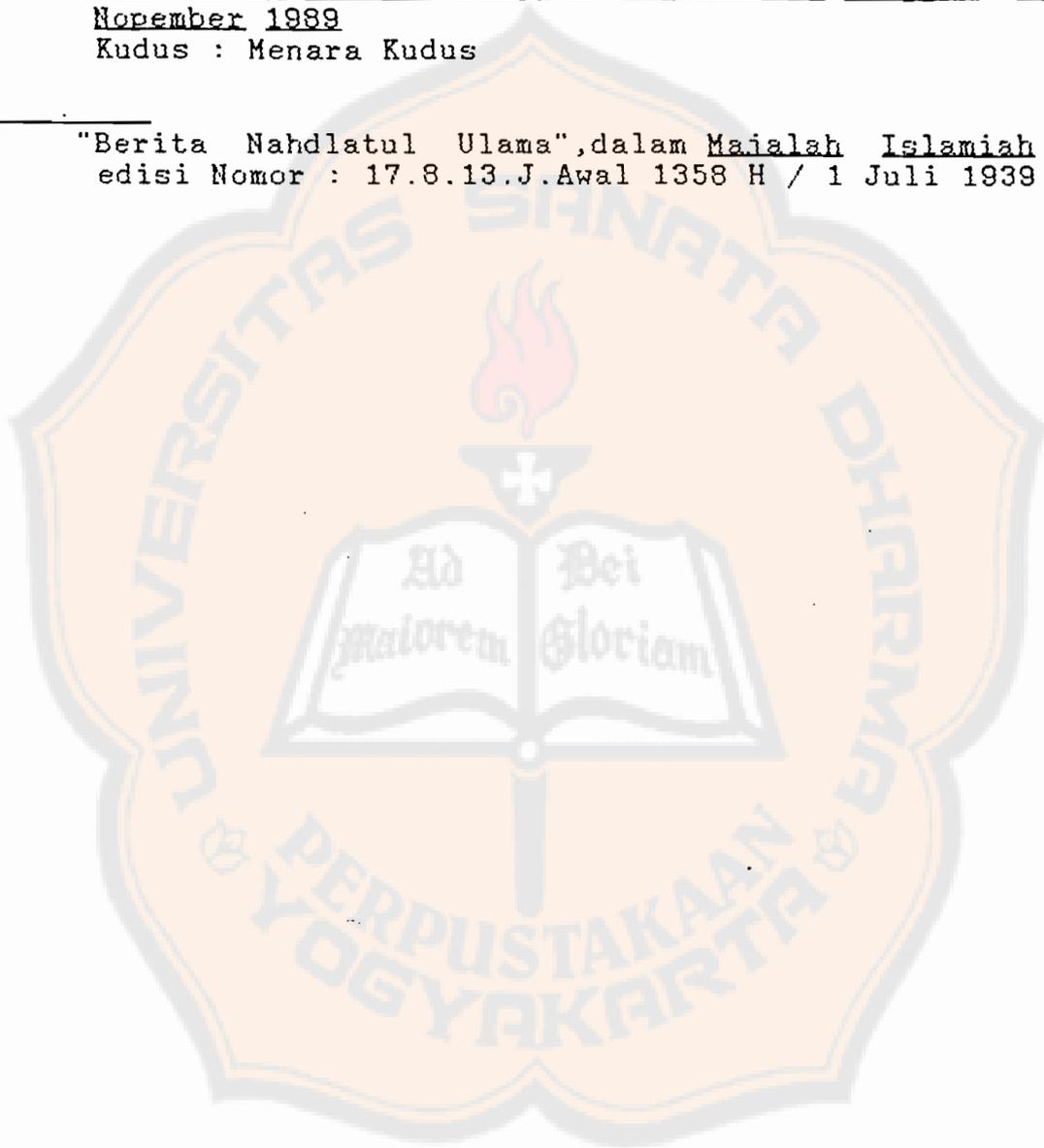
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Zainuddin Hamidy dan Fachruddin

1959 Tafsir Al Qur'an
Jakarta : Widjaja

1989 Permasalahan dan Jawaban Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta, tanggal 25-28 Nopember 1989
Kudus : Menara Kudus

"Berita Nahdlatul Ulama", dalam Majalah Islamiah NU
edisi Nomor : 17.8.13.J.Awal 1358 H / 1 Juli 1939



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sumber Informasi

1. Nama : R.Subarkah Hasyim
Jabatan : Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Purworejo, periode
1994-1999
Waktu : 23 Maret 1994
Tempat : Butuh, Purworejo
2. Nama : Muhtarom BA
Jabatan : Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo sejak
tahun 1967
Waktu : 25 Maret 1994
Tempat : Purworejo
3. Nama : Drs Khanifan
Jabatan : Ketua Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama Kabu-
paten Purworejo, periode 1994-1999
Waktu : 25 Maret 1994
Tempat : Purworejo
4. Nama : Drs Mujahid
Jabatan : Mantan Sekretaris Yayasan Imampuro
Waktu : 25 Maret 1994
Tempat : Purworejo

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Nama : Kyai Jumali

Jabatan : Mantan Sekretaris Lembaga Maarif Jawa Tengah
dan Mantan Ketua Ma'arif kabupaten Purworejo

Waktu : 31 Maret dan 27 April 1994

Tempat : Purworejo

